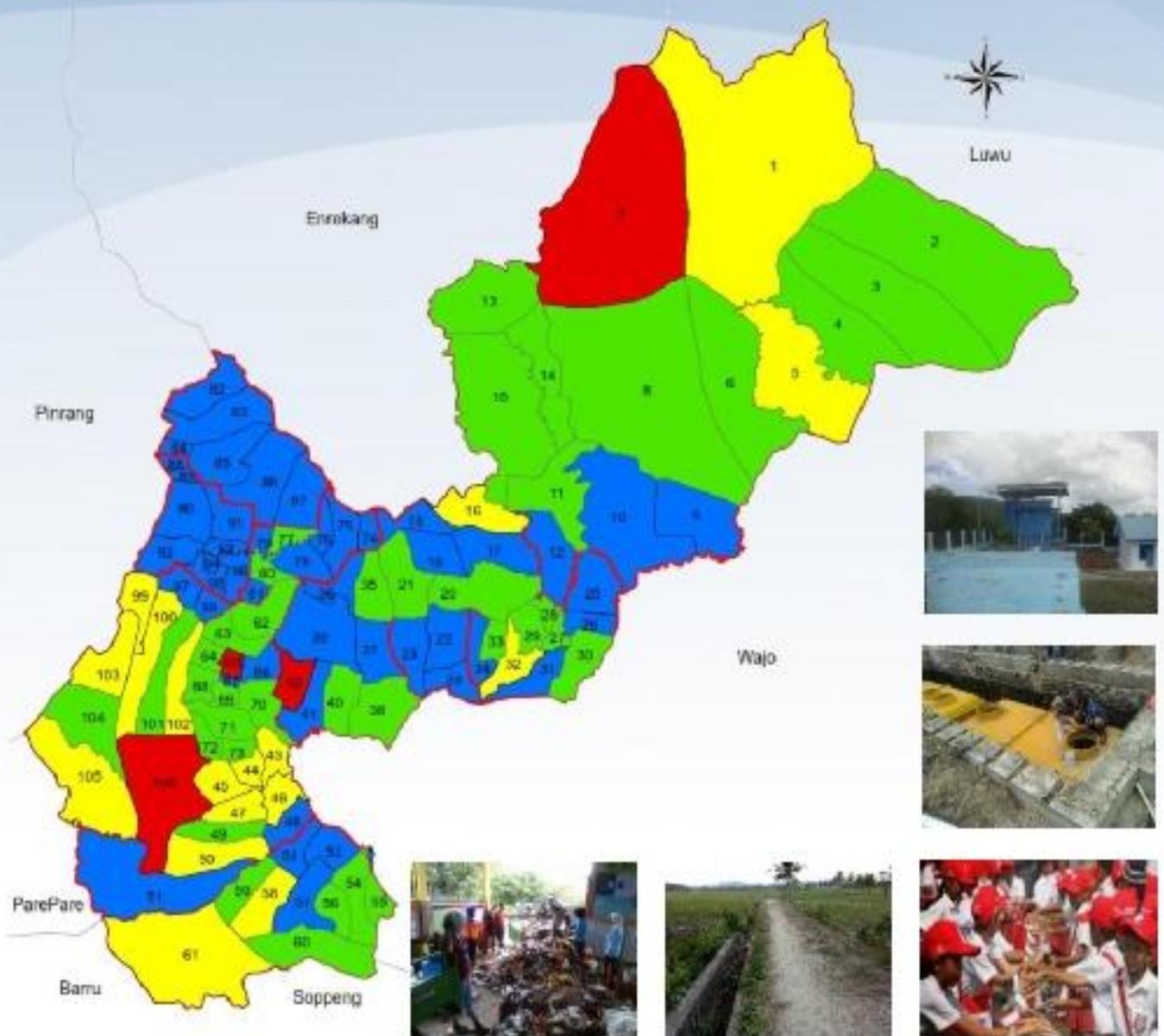


STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN : 2018 - 2022



KATA PENGANTAR



Dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sebagai dokumen perencanaan sanitasi yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk mereview program kegiatan yang ada dalam dokumen SSK sebelumnya, peningkatan kualitas dokumen SSK serta mengimbangi dinamika pertumbuhan jumlah penduduk serta kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang layak terkait dengan pencapaian target Universal Access di akhir tahun 2019. Dokumen SSK tahun 2014-2018 merupakan baseline dalam pemutakhiran dokumen SSK 5 tahun kedepan 2018-2022. Dalam penyusunannya menggunakan data yang aktual dan mutakhir untuk membantu proses perencanaan pembangunan sanitasi (dalam penyusunan SSK) menjadi lebih baik: tepat sasaran, sesuai realitas, menjangkau ke depan, dan terukur.

Tujuan Pemutakhiran dokumen SSK Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Memberikan Panduan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam manajemen kegiatan sanitasi dan Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dengan demikian dokumen ini dapat memberikan gambaran untuk mengidentifikasi Permasalahan dalam Perencanaan pembangunanyang terkait Sanitasi.

Seiring berjalannya waktu, data dalam SSK Kabupaten Sidenreng Rappang akan dilakukan Review setiap tahun khususnya di capaian program dan kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data akurat capaian target sektor sanitasi.

Pangkajene Sidenreng 18 Desember 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

EXECUTIVE SUMMARY

Strategi Sanitasi Kota adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018, maka Visi sanitasi Kabupaten Sidenreng Tahun 2018-2022 adalah Terwujudnya Sanitasi yang layak dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif menuju Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka tahun 2022. Misi di masing-masing sub sektor sanitasi disusun sebagai pedoman dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi penyusunan program kegiatan masing-masing sub sektor.

Dalam rencana pengembangan sanitasi jangka menengah, ada beberapa aspek yang menjadi instrumen dalam penyusunan program kegiatan. Instrument itu terdiri dari kondisi terkini sanitasi, pemetaan area berisiko sanitasi, peta area pengembangan dan rencana pengembangan berdasarkan indikator-indikator masing-masing sub sektor dan kemampuan pendanaan.

Pada sub sektor air limbah domestik permasalahan mendesak adalah masih adanya BABS sebesar 5,1% di perkotaan dan 7,3% di Perdesaan. akses dasar sebesar 6.66% khusus diperdesaan. Selain itu permasalahan mendesak lainnya adalah operasional IPLT belum terlaksana mengingat keterbatasan anggaran APBD, belum ada truck tinja serta tenaga pengelola IPLT yang belum terlatih. Aspek non teknis adalah belum adanya regulasi mengenai pengelolaan air limbah, minimnya promosi mengenai air limbah yang layak. terdapat 4

desa/kelurahan yang berada di Area Berisiko 4 atau berisiko tinggi yang tersebar di 4 kecamatan. Untuk area berisiko 3 atau berisiko tinggi terdapat 18 desa/kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan. Target pengembangan air limbah domestik adalah stop BABS untuk jangka pendek tahun 2019 adalah 0%. Peningkatan akses layak dari 77.9% menjadi 90% untuk jangka menengah. Untuk perkotaan Akses layak berupa SPALD-S sebesar 39.08% dan SPALD-T sebesar 11.88%. sementara untuk perdesaan SPALD-S 36.63% dan SPALD-T 2.71% dan akses dasar sebesar 9,7%. Untuk mencapai target jangka menengah maka akan dilakukan penyusunan outline plan air limbah, pengoperasian IPLT, pengadaan truck tinja, pembangunan SPALD-T skala permukiman 35 unit , SPALD-S skala komunal 1369 unit dan SPALD-S skala individu 4325 unit.

Pada sub sektor persampahan permasalahan mendesak adalah masih adanya sampah yang belum terproses yaitu di perkotaan 11.25% dan di perdesaan 24.35%. Daya tampung TPA 198m³/hari sementara produksi sampah mencapai 433.87m³/hari. Di TPS3R sendiri hanya mampu mengolah sampah 48 m³/hari. Untuk non teknis jumlah pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan persampahan, Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan masih sangat rendah, Promosi mengenai pengelolaan persampahan melalui media masih kurang. Pemetaan wilayah area sangat berisiko atau risiko 4 terdapat 8 desa/kelurahan dimana di kec. Tellu limpoe terdapat 4 kelurahan. Hal ini disebabkan kawasan kumuh, kurangnya infrastruktur persampahan, minimnya pelayanan persampahan dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. Untuk area berisiko tinggi atau Risiko 3 terdapat 23 desa/kelurahan yang tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan kecuali Panca Rijang. Target pengembangan persampahan adalah pengelolaan sampah dari sampah tidak terproses untuk jangka pendek tahun 2019 adalah 15.58% itupun hanya untuk wilayah perdesaan untuk perkotaan sendiri menjadi 0%. Peningkatan akses layak dari 27,66% menjadi 71,57% untuk jangka menengah. Pelayanan ini melalui TPA 57.51% dan TPS-3R 14,06%. Untuk mencapai target jangka menengah maka akan dilakukan

peningkatan luasan TPA dari 2 Ha menjadi 2.9 ha, pembangunan TPS3R sebanyak 64 unit, pembangunan TPS untuk pelayanan TPA tidak langsung sebanyak 121 unit, pengadaan alat berat TPA, pengadaan armada angkutan gerobak 13 unit dan motor sampah 83 unit.

Pada sub sektor drainase permasalahan mendesak adalah Permasalahan mendesak di sub sektor drainase adalah Dokumen masterplan drainase hanya untuk Kecamatan Maritenggae dan belum pernah di review sejak penyusunannya tahun 2013 selain itu terjadi peningkatan luas genangan dari 1455 Ha menjadi 5127,13 Ha. Permasalahan lainnya adalah peningkatan kepadatan penduduk dan perkembangan kota mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan yang berpotensi meningkatkan debit banjir. Adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase membuang sampah di saluran drainase. Pemetaan wilayah Untuk sub sektor drainase area sangat berisiko atau risiko 4 terdapat 3 desa/kelurahan. Hal ini disebabkan berkembang pesatnya pembangunan perumahan, dan pengaruh banjir dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. Untuk area berisiko tinggi atau Risiko 3 terdapat 2 desa/kelurahan yaitu Kel. Maccorawalie dan Kel. Ponrangae. Target pengembangan drainase jangka menengah adalah berkurangnya area genangan sebesar 50% dari 179.83 Ha menjadi 83.9 Ha. Untuk mencapai target ini maka akan dilakukan penyusunan review master plan air drainase, rehabilitasi pembangunan drainase kawasan permukiman, pembangunan saluran sekunder dan primer, pembangunan kolam retensi. Untuk menindaklanjuti pembangunan yang berkelanjutan akan dibangun sumur resapan.

Total pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kegiatan Jangka menengah diatas adalah Rp. 374.995.000.000,- dimana sub sektor air limbah sebesar Rp. 123.379.000.000,- persampahan Rp. 81.716.000.000,- dan drainase sebesar Rp. 170.000.000.000,- dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Rp. 88.886.000.000,-; APBD Provinsi Rp. 31.887.000.000,-; APBN

Rp. 193.842.000.000,- DAK R[p. 44.799.000.000,- ; CSR Rp. 8.701.000.000,- dan Masyarakat Rp. 6.880.000.000,-

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan kemajuan pelaksanaan program kegiatan secara terpadu. Setiap tahun program kegiatan dibuatkan laporan monitoring dan evaluasi dari masing-masing sub sektor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
EXECUTIVE SUMMARY	3
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR SINGKATAN	12
DAFTAR GAMBAR	13
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Metodologi Penyusunan	17
1.3. Dasar Hukum	18
1.4. Sistematika Penulisan	25
BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI	28
2.1 Gambaran Wilayah	28
2.1.1 Administratif	29
2.2 Kemajuan Pelayanan SSK	35
2.2.1 Air limbah domestik	35
2.2.2 Pengelolaan Persampahan	41
2.2.3 Drainase perkotaan	43
2.3 Profil Sanitasi Saat ini	46
2.3.1 Air limbah domestik	46
2.3.2 Persampahan	56
2.3.3 Drainase	67
2.4 Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi	72
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI	84
3.1 Visi dan Misi Sanitasi	84
3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi	88
3.2.1 Tahapan Pengembangan sanitasi	88
A. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik	88

B.	Tahapan Pengembangan Persampahan	92
C.	Tahapan Pengembangan Drainase.....	94
3.2.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi.....	96
A.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik	96
B.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan	98
C.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase.....	100
3.2.3	Skenario Pencapaian sasaran	102
3.3	Kemampuan Pendanaan Sanitasi daerah	103
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI		109
4.1.	Air Limbah Domestik	109
4.2.	Pengelolaan Persampahan	110
4.3.	Drainase Perkotaan	111
BAB V KERANGKA KERJA LOGIS		113
5.1.	Matriks KKL Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	113
5.2.	Matriks KKL Pengelolaan Persampahan	117
5.3.	Matriks KKL Drainase.....	122
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN		127
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK.....		140

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nama, Luas Wilayah per kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan ...	30
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk dan KK 2015-2019.....	32
Tabel 2. 3 Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya 2017-2021	33
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan	34
Tabel 2. 5 Kemajuan SSK sektor air limbah.....	39
Tabel 2. 6 Kemajuan SSK sektor Persampahan	42
Tabel 2. 7 Kemajuan SSK sektor drainase.....	45
Tabel 2. 8 Diagram sistem sanitasi (DSS) pengelolaan air limbah (IPLT, IPAL terpusat/kawasan, Sanimas, dll)	46
Tabel 2. 9 Tabel Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten/Kota	49
Tabel 2. 10 Tabel Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten/Kota	50
Tabel 2. 11 Kondisi sarana Prasarana Air Limbah	53
Tabel 2. 12 Rekapitulasi Shif Flow Diagram.....	54
Tabel 2. 13 Diagram Sistem Sanitasi Persampahan	58
Tabel 2. 14 Penanganan Persampahan Wilayah Perkotaan	61
Tabel 2. 15 Penanganan Persampahan Wilayah Perdesaan	62
Tabel 2. 16 Kondisi Prasarana dan sarana persampahan.....	64
Tabel 2. 17 Lokasi Genangan.....	68
Tabel 2. 18 Area Berisiko Air Limbah Domestik	75
Tabel 2. 19 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik	76
Tabel 2. 20 Area Berisiko Persampahan.....	78
Tabel 2. 21 Permasalahan Mendesak Persampahan.....	79
Tabel 2. 22 Area Berisiko Drainase Perkotaan	82
Tabel 2. 23 Permasalahan Mendesak Drainase Perkotaan	82

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022	85
Tabel 3. 2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik.....	91
Tabel 3. 3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Sidenreng Rappang	94
Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Sidenreng Rappang	95
Tabel 3. 5 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik	97
Tabel 3. 6 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan.....	99
Tabel 3. 7 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase.....	101
Tabel 3. 8 Skenario Rencana Pendanaan	102
Tabel 3. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi	103
Tabel 3. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi 2018-2022	105
Tabel 3. 11 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi	106
Tabel 3. 12 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan.....	107
Tabel 3. 13 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK	107
Tabel 5. 1 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air limbah domestik	114
Tabel 5. 2 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Persampahan	118
Tabel 5. 3 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Drainase Perkotaan....	123

Tabel 6. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun	128
Tabel 6. 2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber	129
Tabel 6. 3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota ..	131
Tabel 6. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	133
Tabel 6. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN.....	135
Tabel 6. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK.....	137
Tabel 6. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan SWASTA/CSR.....	138
Tabel 6. 8 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Masyarakat	139
Tabel 7. 1 Capaian Strategis Air Limbah.....	142
Tabel 7. 2 Capaian Strategis Persampahan.....	144
Tabel 7. 3 Capaian Strategis Drainase	146
Tabel 7. 4 Infrastruktur dan Akses	148
Tabel 7. 5 Pelaporan Monev Implementasi SSK.....	150
Tabel 7. 6 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Sidenreng Rappang....	151

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPS	: Buku Putih Sanitasi
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DSS	: Diagram Sistem Sanitasi
Ha	: Hektare
POKJA	: Kelompok Kerja
PPSP	: Program Percepatan Sanitasi Permukiman
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SPALD-S	: Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat
SPALD-T	: Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Dinas
SSK	: Strategi Sanitasi Kabupaten
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPST	: Tempat Pengeolahan Sampah Terpadu
TPS3R	: Tempat Pengeolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
UU	: Undang-undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen SSK dan Dokumen Perencanaan Lainnya	15
Gambar 2. 1 Peta Tutupan lahan Kabupaten Sidenreng Rappang	29
Gambar 2. 2 Peta Rencana Struktur Ruang wilayah	34
Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang wilayah	35
Gambar 2. 4 Peta Cakupan Layanan Air Limbah	48
Gambar 2. 5 Shit Flow Diagram	54
Gambar 2. 6 Peta Cakupan layanan Persampahan	60
Gambar 2. 7 Peta Area Genangan	68
Gambar 2. 8 Peta Area Berisiko Air Limbah	74
Gambar 2. 9 Peta Area Berisiko Persampahan	77
Gambar 2. 10 Peta Area Berisiko Drainase	81
Gambar 3. 1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik	90
Gambar 3. 2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan	93
Gambar 6. 1 Trend pendanaan Sanitasi sumber pendanaan APBD	132
Gambar 6. 2 Persentase Pendanaan Sanitasi melalui APBD Provinsi	133
Gambar 6. 3 Pendanaan Sanitasi APBN	136

BAB I PENDAHULUAN

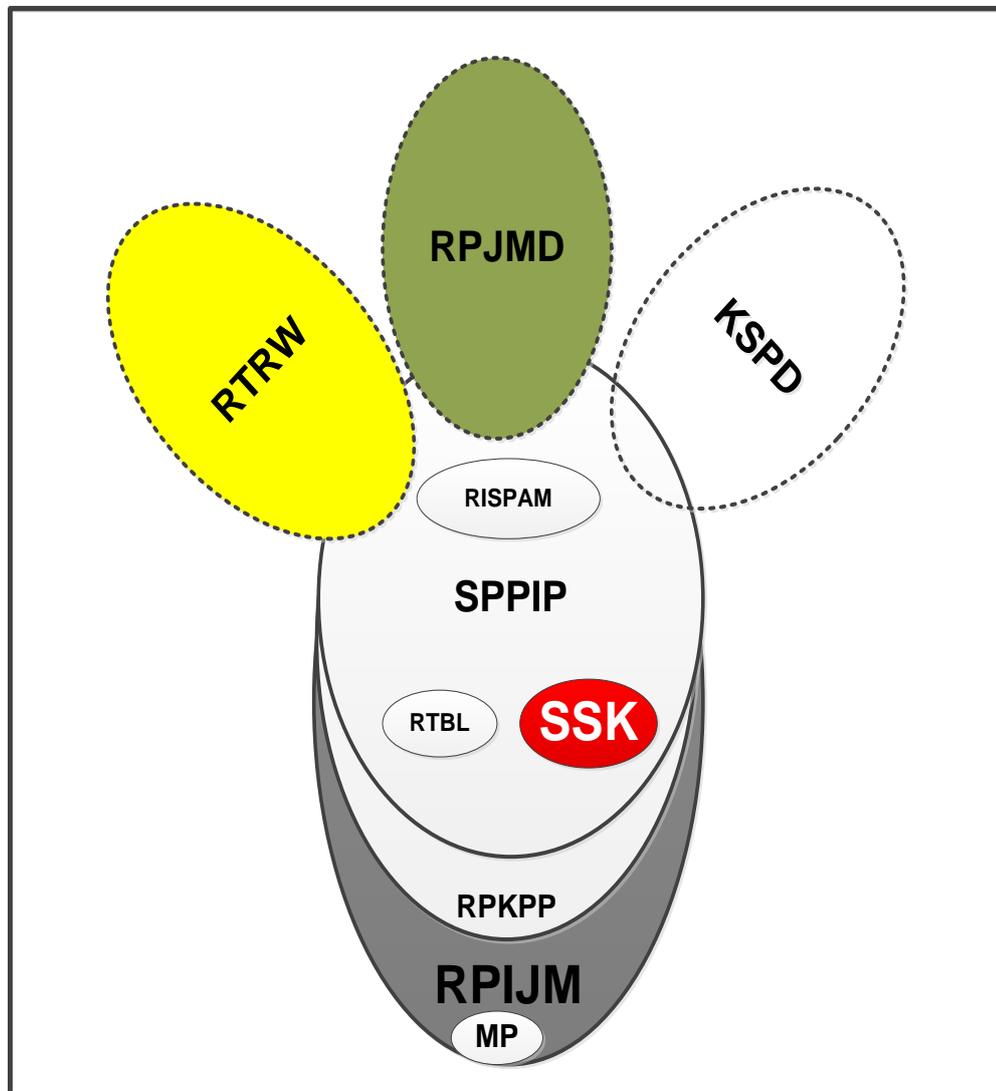
1.1. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2014-2019 disebutkan bahwa prioritas pembangunan perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum di kawasan desa tertinggal dan berkembang; Mengembangkan jaringan sanitasi (pengolahan sampah dan air limbah) melalui sistem pengumpulan secara komunal di kota sedang dan mengarahkan pengolahan terpusat untuk kota besar dan metropolitan; Peningkatan jaringan sanitasi dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah di kawasan perdesaan; Penyediaan sarana dan prasarana perumahan di kawasan desa tertinggal dan berkembang khususnya dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; Peningkatan jaringan sanitasi dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah di kawasan perdesaan.

Salah satu tantangan serius kita bangsa Indonesia adalah seberapa mampu kita menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan air minum dan sanitasi. Menumbuhkan kesadaran tentang air minum berarti menumbuhkan kemampuan kita dalam mengelola, memanfaatkan, mengeksplorasi, dan mengembangkan berbagai potensi air itu sendiri, sekaligus menumbuhkan kemampuan kita dalam menangani, mengantisipasi, dan memecahkan berbagai masalah yang ditimbulkannya, termasuk masalah yang ditimbulkan oleh krisis air (Tri utomo, Pokja AMPL Nasional....).

Untuk dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan air minum dan sanitasi maka dibutuhkan perencanaan pembangunan sanitasi: yang terpadu, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan berkelanjutan, serta perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya

memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan.



Sumber : Pedoman RPIJM, 2013

Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen SSK dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen SSK sebagai dokumen perencanaan sanitasi 5 tahunan tidak dapat berdiri sendiri. Dokumen tersebut mengacu pada dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen RPJMD, RTRW, RPIJM dan seperti terlihat pada Gambar 1.1

Dalam dokumen RPJMD 2014-2018 salah satu program prioritas adalah pembangunan sanitasi yang layak yang tercantum dalam Misi IV Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah. dengan sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas. Dalam dokumen RTRW perencanaan pola ruang khususnya kawasan permukiman sebagaimana dalam peta rencana tatagunalahan, merupakan baseline dalam menghitung luas area terbangun. Hal ini penting untuk melihat kepadatan penduduk dan kebutuhan infrastruktur sanitasi serta penataan pola ruang untuk penempatan lokasi infrastruktur sanitasi yang memerlukan lahan yang luas seperti IPLT, TPA. Sementara dalam dokumen RPIJM 2018-2022 program kegiatan yang terkait dengan sanitasi di sektor Penyehatan Lingkungan permukiman (PLP) mengacu pada program kegiatan dokumen SSK dan program strategis teknis SKPD terkait

Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data aktual (2) berskala kota (3) disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down (SSK Kab. Sidrap, 2013).

Strategi Sanitasi Kota adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK disusun oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Pokja AMPL tahun 2013 telah menyusun Dokumen Strategi Sanitasi Kota 2014-2018. Beberapa program kegiatan yang tercantum didalamnya telah banyak dilaksanakan, baik dari sub sektor Air Limbah, persampahan, drainase dan prohisn. Melalui pendanaan APBN, APBD I, APBD II, CSR dan peran serta

STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

masyarakat. Sampai dengan tahun 2017 sejumlah fasilitas infrastruktur sanitasi telah terbangun diantaranya IPLT skala medium, peningkatan kinerja TPA, pembangunan saluran Drainase Primer, sekunder dan Tersier, Pembangunan TPS 3R dan beberapa program kegiatan lainnya yang terkait dengan sanitasi. Akan tetapi tidak semua program kegiatan dalam dokumen tersebut terlaksana. Ada beberapa kendala teknis dan non teknis sehingga kegiatan tersebut sulit untuk dilaksanakan.

Olehnya itu perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK sebagai dokumen perencanaan sanitasi yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk mereview program kegiatan yang ada dalam dokumen SSK sebelumnya, peningkatan kualitas dokumen SSK serta mengimbangi dinamika pertumbuhan jumlah penduduk serta kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang layak terkait dengan pencapaian target Universal Access di akhir tahun 2019. Dokumen SSK tahun 2014-2018 merupakan baseline dalam pemutakhiran dokumen SSK 5 tahun kedepan 2018-2022.

1.2. Metodologi Penyusunan

Memberikan informasi terkait metode dan jenis data (primer dan sekunder) yang digunakan dalam penyusunan SSK, proses penulisan/dokumentasi SSK, dan proses penyepakatannya terpaparkan

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen SSK adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil survey langsung, wawancara dengan narasumber, survey EHRA, dll. Data sekunder diperoleh dari hasil data survey BPS dan SKPD yang terkait. Selain itu data juga diperoleh dari dokumen SSK sebelumnya, serta beberapa kegiatan inovasi yang terkait dengan sanitasi.
2. Mengolah data, data yang diolah berdasarkan hasil kajian/study:

- a. Kajian EHRA
 - b. Kajian Peran swasta
 - c. Kajian kelembagaan dan kebijakan
 - d. Kajian Komunikasi dan media
 - e. Kajian peran serta masyarakat
 - f. Kajian samitasi sekolah
 - g. Kajian keuangan dan perekonomian daerah
3. Proses penulisan/dokumentasi SSK dilakukan oleh Tim Penyusun SSK yang terbentuk berdasarkan SK Bupati No. dalam penyusunannya ada dua metode, yaitu metode kuantitatif dengan kajian EHRA dan metode kualitatif dengan Analisis SWOT.
 4. Tim penyusun Dokumen SSK bersama Pokja AMPL, Legislatif, TAPD, Masyarakat, LSM, melakukan penyepakatan-penyepakatan dalam penyusunan dokumen SSK untuk menjaga kualitas dokumen SSK. Penyepakatan yang dilakukan diantaranya persepsi SKPD, penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi saat ini, permasalahan mendesak di Air limbah, persampahan dan drainase, menyepakati visi dan misi Sanitasi selama 5 Tahun, strategi sanitasi, ekspose hasil kajian EHRA dan Non EHRA, hasil analisis serta hasil akhir dari dokumen SSK. Proses penyepakatan dilakukan melalui Rapat Internal Tim penyusun, Lokakarya, Forum diskusi, dll.

1.3. Dasar Hukum

Dokumen Strategi Sanitasi Kota Kabupaten Sidrap mengacu pada beberapa regulasi sebagai berikut :

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persisten Organic Pollutants
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang Mutu Air Limbah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Air tanah harus dikelola secara terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan hidup);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

C. Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

D. Keputusan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia

1. Peraturan Menteri PU Republik Indonesia nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air;
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib di lengkapi dengan AMDAL;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Menteri PU Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri PU Republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank sampah;
13. Peraturan Menteri PU Republik Indonesia nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
14. Peraturan Menteri PU Republik Indonesia nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri PU Republik Indonesia nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
16. Peraturan Menteri PU Republik Indonesia nomor 12/PRT/M/2014 tentang Drainase Perkotaan
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik;

E. Petunjuk Teknis

1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I. Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi

Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah;

3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B. Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan;
4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik;
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I. Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;
8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman;
9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus;
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis Saluran Irigasi;
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis MCK.

Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 - 2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial & Fasilitas Umum.
6. Peraturan Daerah No. 07 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata cara pengelolaan sampah dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 37 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011-2015
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sehat, Siaga Aktif Mandiri
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Mandiri Kesehatan Desa dan Kelurahan.
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Sidrap terdiri dari 7 bab yang meliputi :

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II Profil Sanitasi Saat Ini

Dalam bab ini membahas gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, Profil Sanitasi saat ini, serta area berisiko dan permasalahan mendesak sanitasi Kabupaten Sidrap .

Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi

Membahas visi dan misi sanitasi Kabupaten Sidrap , pentahapan pengembangan sanitasi yang meliputi : tahapan pengembangan sanitasi; tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi; skenario pencapaian sasaran serta membahas kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi

Berisikan penjelasan detail mengenai strategi pengembangan sanitasi yang meliputi : air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase perkotaan.

Bab V Kerangka Kerja Logis

Memaparkan tentang permasalahan mendesak, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan sanitasi

Bab VI Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Menyajikan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang meliputi : air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase perkotaan, dan PHBS terkait sanitasi baik pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah maupun funding gap.

Bab VII Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Memberikan gambaran umum struktur monev capaian Strategi Sanitasi Kabupaten meliputi : capaian stratejik, capaian kegiatan, evaluasi dan pelaporan monev implementasi SSK.

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1 Gambaran Wilayah

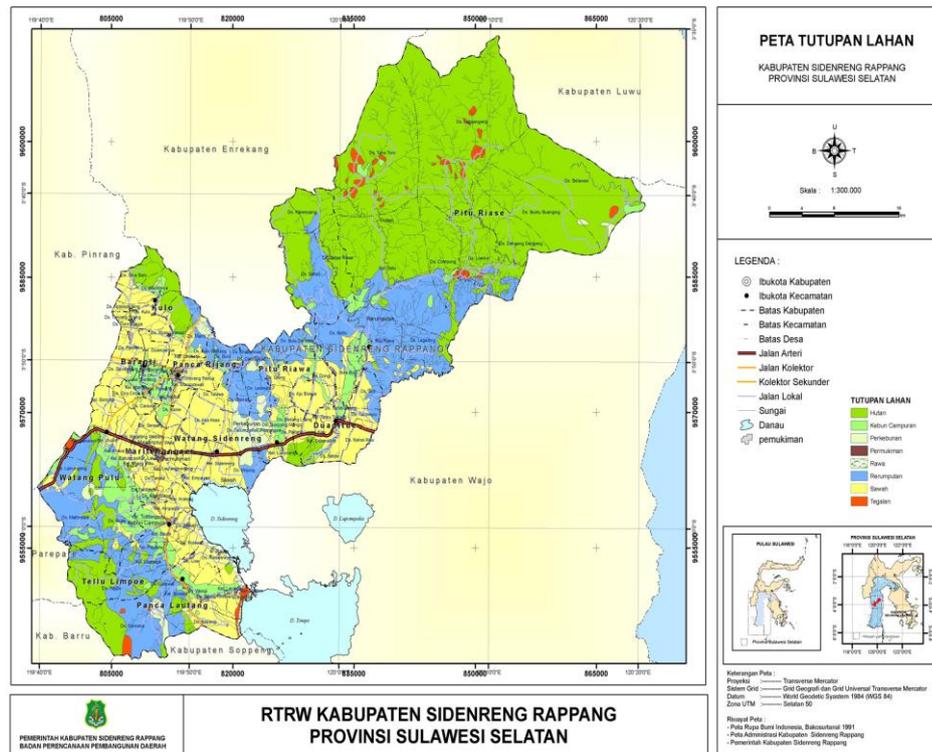
Wilayah kajian Strategi sanitasi Kota Kab.Sidenreng Rappang menyediakan data dasar mengenai kondisi obyektif Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk permasalahan serta kebutuhan sanitasi dasar dan air minum, sehingga dokumen ini nantinya dapat diposisikan sebagai acuan yang bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan sanitasi. Wilayah ini meliputi seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 106 (seratus enam) desa/kelurahan.

Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Soppeng.

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis 3°43' - 4°09' Lintang Selatan (LS) dan 119°41' - 120°10' Bujur Timur (BT) dengan posisi strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

Berdasarkan Peta Tutupan lahan RTRW penggunaan lahan terbagi atas Hutan, Kebun campuran, Sawah



Sumber : RTRW Kab. Sidenreng rappang 2012-2032

Gambar 2. 1 Peta Tutupan lahan Kabupaten Sidenreng Rappang

2.1.1 Administratif

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 Km², yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kec. Pitu Riase dengan luas wilayah sebesar 84.477 Ha atau sebesar 44.84% dari luas Wilayah Kab. Sidenreng rappang. Sementara kecamatan terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Panca Rijang sebesar 3.402 Ha atau sebesar 1.81%.

STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Di Kecamatan Kulo secara administratif pemerintahannya hanya desa yang terdiri dari 6 desa, sementara Kec. Maritengngae sebagai Ibu Kota Kabupaten memiliki 7 Kelurahan dari 12 desa/kelurahan yang ada. disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 1 Nama, Luas Wilayah per kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Luas Wilayah Administrasi		Luas Wilayah Terbangun	
		Ha	(%) thd total	Ha	(%) thd total
Kecamatan Panca Lautang	10	15.393	8,17	398.28	2.59%
Kecamatan Tellu Limpoe	9	10.320	5,48	318.45	3.09%
Kecamatan Watang Pulu	10	15.131	8,03	495.65	3.28%
Kecamatan Baranti	9	5.389	2,86	754.19	13.99%
Kecamatan Panca Rijang	8	3.402	1,81	548.11	16.11%
Kecamatan Kulo	6	7.500	3,98	256.52	3.42%
Kecamatan Maritengngae	12	6.590	3,50	828.22	12.57%
Kecamatan Wattang Sidenreng	8	12.081	6,41	388.01	3.21%
Kecamatan Dua Pitue	10	6.999	3,72	332.58	4.75%
Kecamatan Pitu Riawa	12	21.043	11,17	457.16	2.17%
Kecamatan Pitu Riase	12	84.477	44,84	881.73	1.04%
TOTAL	106	188.325	100,00	5659	100,00

Sumber : BPS Kab. Sidrap Tahun 2016

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2017 sebanyak 297.890 jiwa, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 51.061 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2017 52 Jiwa/Ha, jika dibandingkan luas wilayah terbangun . Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Dua pitue yaitu sekitar 88 jiwa/Ha. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pitu Riase yaitu sekitar 25 Jiwa/Ha.

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu

juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 3 tahun terakhir.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk dan KK 2015-2019

Nama Kecamatan	Jumlah penduduk																			
	Wilayah Perkotaan										Wilayah Perdesaan									
	Tahun										Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Kecamatan Panca Lautang	6,126	1,531	6,218	1,554	6,311	1,578	6,406	1,601	6,502	1,625	11,637	2,909	11,812	2,953	11,989	2,997	12,169	3,042	12,352	3,088
Kecamatan Tellu Limpoe	19,535	4,884	19,828	4,957	20,126	5,031	20,427	5,107	20,734	5,183	4,760	1,190	4,831	1,208	4,903	1,226	4,977	1,244	5,052	1,263
Kecamatan Watang Pulu	23,047	5,762	23,393	5,848	23,744	5,936	24,100	6,025	24,461	6,115	12,223	3,056	12,406	3,101	12,592	3,148	12,781	3,195	12,973	3,243
Kecamatan Baranti	20,250	5,063	20,554	5,138	20,862	5,216	21,175	5,294	21,493	5,373	10,412	2,603	10,569	2,642	10,727	2,682	10,888	2,722	11,051	2,763
Kecamatan Panca Rijang	21,477	5,369	21,799	5,450	22,126	5,532	22,458	5,615	22,795	5,699	7,764	1,941	7,880	1,970	7,998	2,000	8,118	2,030	8,240	2,060
Kecamatan Kulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,395	3,099	12,581	3,145	12,769	3,192	12,961	3,240	13,155	3,289
Kecamatan Maritengngae	37,742	9,436	38,308	9,577	38,883	9,721	39,466	9,867	40,058	10,015	13,319	3,330	13,519	3,380	13,721	3,430	13,927	3,482	14,136	3,534
Kecamatan Wattang Sidenreng	8,239	2,060	8,362	2,091	8,488	2,122	8,615	2,154	8,744	2,186	9,898	2,475	10,047	2,512	10,198	2,549	10,351	2,588	10,506	2,626
Kecamatan Dua Pitue	7,500	1,875	7,613	1,903	7,727	1,932	7,843	1,961	7,960	1,990	22,145	5,536	22,477	5,619	22,814	5,704	23,156	5,789	23,504	5,876
Kecamatan Pitu Riawa	5,305	1,326	5,384	1,346	5,465	1,366	5,547	1,387	5,630	1,408	21,465	5,366	21,787	5,447	22,114	5,528	22,445	5,611	22,782	5,695
Kecamatan Pitu Riase	2,671	668	2,711	678	2,752	688	2,793	698	2,835	709	19,980	4,995	20,280	5,070	20,584	5,146	20,893	5,223	21,206	5,302

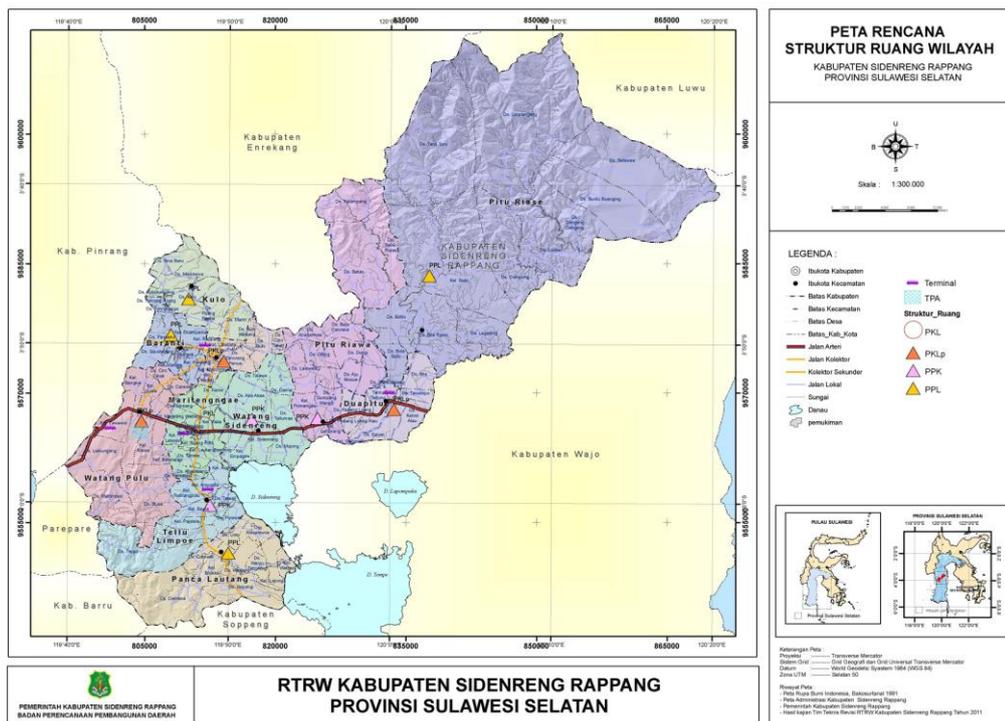
Tabel 2. 3 Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya 2017-2021

Nama Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)					Kepadatan Penduduk (orang/ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kecamatan Panca Lautang	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	44	44	45	45	45
Kecamatan Tellu Limpoe	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	76	76	77	77	78
Kecamatan Watang Pulu	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	70	71	72	72	73
Kecamatan Baranti	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	40	40	41	41	41
Kecamatan Panca Rijang	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	53	53	54	54	54
Kecamatan Kulo	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	48	48	49	49	49
Kecamatan Maritengngae	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	61	61	62	62	63
Kecamatan Wattang Sidenreng	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	46	47	47	47	48
Kecamatan Dua Pitue	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	88	89	90	90	91
Kecamatan Pitu Riawa	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	58	58	59	59	60
Kecamatan Pitu Riase	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	25	26	26	26	26

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1	Kecamatan Panca Lautang	7,502
2	Kecamatan Tellu Limpoe	9,306
3	Kecamatan Watang Pulu	11,578
4	Kecamatan Baranti	5,373
5	Kecamatan Panca Rijang	4,971
6	Kecamatan Kulo	3,065
7	Kecamatan Maritengngae	8,339
8	Kecamatan Wattang Sidenreng	5,966
9	Kecamatan Dua Pitue	7,977
10	Kecamatan Pitu Riawa	10,011
11	Kecamatan Pitu Riase	9,156

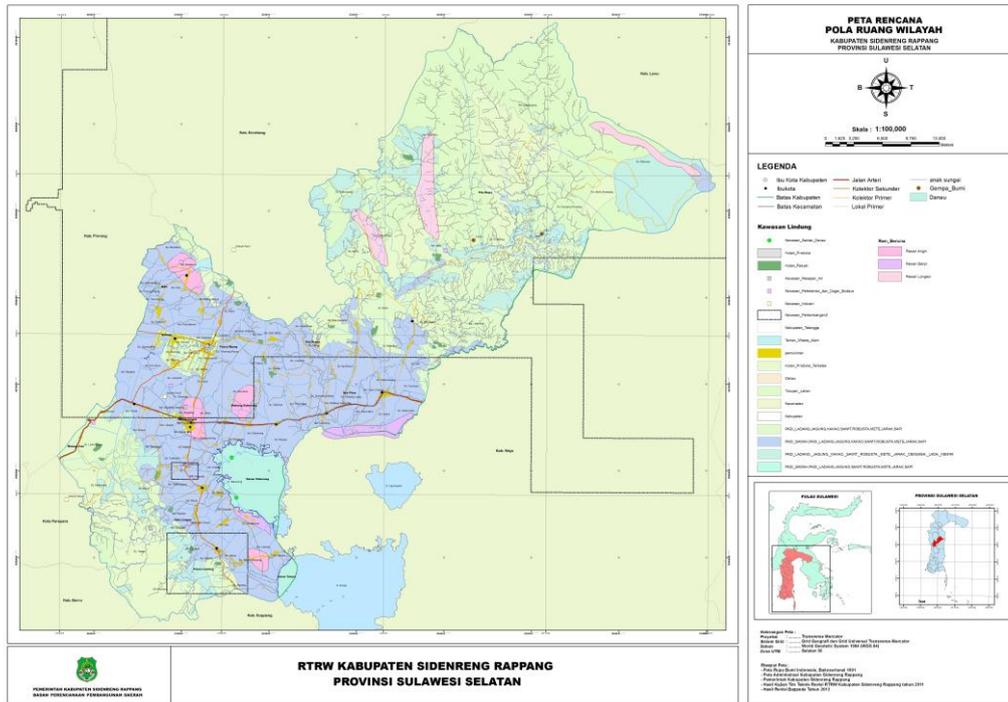
Sumber : BPS Kab. Sidrap Tahun 2016



Sumber : RTRW Kab. Sidrap Tahun 2012-2032

Gambar 2. 2 Peta Rencana Struktur Ruang wilayah

**STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



Sumber : RTRW Kab. Sidrap Tahun 2012-2032

Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang wilayah

2.2 Kemajuan Pelayanan SSK

2.2.1 Air limbah domestik

Sarana sanitasi air limbah wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang secara kuantitas dan kualitas sudah banyak mengalami kemajuan dalam 5 tahun terakhir. Dalam SSK tahun 2014-2018 target penurunan BABS direncanakan dari 22.3% tahun 2013 turun menjadi 15% tahun 2018. Akan tetapi adanya kebijakan baru dalam NAWACITA yaitu UNIVERSAL ACCESS 100 0 100 dimana Sektor sanitasi yang layak 85% dan akses dasar 15%, maka pemerintah melakukan kebijakan akselerasi penuntasan angka Stop BABS menjadi 0% tahun 2018. Beberapa kebijakan dilakukan melalui :

STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- PERATURAN BUPATI SIDRAP NOMOR 27 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa Dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri

- PERATURAN BUPATI NO. 06 TAHUN 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada pasal 12 POIN d. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan: “.....3. Pembangunan MCK, dan 4. rehabilitasi sarana air bersih milik desa

- SURAT EDARAN NOMOR : 050/1646/Bappeda tanggal 24 Maret 2016 tentang pelaksanaan Program Mandiri Kesehatan

- PERATURAN BUPATI NO. 05 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penyelesaian target jamban keluarga tahun 2017 dan air bersih tahun 2018. Pada Pasal 12 disebutkan ayat 1 yaitu :Penggunaan belanja modal dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, harus sesuai dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan diprioritaskan digunakan untuk (a) Pembangunan/rehabilitasi sarana air bersih di desa; (b) Pembangunan Jamban Keluarga; (c) Pembangunan sarana sanitasi lainnya. Kemudian pada ayat 2 disebutkan Setelah prioritas dan target kebutuhan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya, desa dapat melakukan penggunaan belanja modal dan pembangunan untuk : (a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa; (b) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan; (c) Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian; (d) Pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar; (e) Pembangunan sarana dan prasarana dasar; (f) Bantuan biaya pemilihan kepala desa.

Sampai dengan tahun 2015 jumlah masyarakat yang memiliki capaian akses sanitasi layak di sub sektor air limbah sudah 77,92% dan layanan dasar

masih ada sudah 6.66%. Praktik BABS tinggal 12,84% dan 3.02% cubluk di perkotaan. Tidak dapat dipungkiri masih ada sebagian besar rumah tangga masih melakukan pembuangan ke lahan terbuka, drainase, saluran irigasi, bahkan ke sungai, masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan masih menggunakan closet cemplung (cubluk), belum adanya penyedotan lumpur tinja.

Dalam pengelolaan limbah cair domestik di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar masyarakat masih menggunakan SPALD-S skala individual sebesar 74.5% serta masih sangat sedikit yang sudah menggunakan sistem komunal yaitu sebesar 3.43% . Sedangkan untuk SPALD-T sudah ada sebesar 0.84%.

Dalam SSK tahun 2014-2018 direncanakan akan dibangun IPLT pada tahun 2016 dan beberapa infrastruktur air limbah lainnya. Beberapa infrastruktur air limbah telah dibangun seperti IPLT tahun 2016 Pembangunan MCK Komunal di area sangat berisiko dan berisiko sangat tinggi juga telah dibangun pada tahun 2014 sebanyak 4 unit, tahun 2015 3 unit dan tahun 2016 6 unit. Kemudian di tahun 2015 juga telah dibangun 4 IPAL Komunal di kawasan area berisiko sangat tinggi. Meskipun telah dibangun IPLT namun belum beroperasi sehingga belum melayani penyedotan lumpur tinja kepada masyarakat, akibatnya banyak masyarakat yang sama sekali tidak pernah melakukan penyedotan lumpur tinja. Selain itu regulasi yang terkait dengan pengolahan air limbah belum disusun.

Beberapa target lainnya seperti penyusunan Master plan Air limbah belum disusun, pembangunan IPAL skala kawasan juga belum dibangun. Beberapa kendala teknis seperti penganggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Untuk aspek non teknis pemecuan CLTS telah dilakukan dan sudah ada 2 kecamatan yang mendekalerasikan ODF yaitu kecamatan Baranti dan kecamatan Kulo. Tentu saja ini melibatkan seluruh unsur mulai dari pemerintah melalui Dinas terkait yaitu Dinas kesehatan dan Badan KB dan PP, tokoh masyarakat Agama dan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana target dalam SSK tahun 2014-2018 yaitu

melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam memotivasi masyarakat melakukan perilaku hidup sehat. Publikasi melalui media juga telah dilakukan meskipun hanya sebatas informasi desa/kelurahan ODF.. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pun telah dilakukan melalui Dinas Cipta karya dan tata Ruang dengan melakukan survey akses sanitasi dan air bersih tahun 2016 dan BAPPEDA dengan melakukan survey kondisi infrastruktur air bersih dan sanitasi. Kermajuan SSK tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Kemajuan SSK sektor air limbah

SSK Tahun 2014-2018			Kemajuan SSK			
Tujuan	Sasaran	Data dasar tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Status saat ini 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya perencanaan sektor sanitasi yang terpadu dan menyeluruh dan merupakan komitmen bersama bagi terselenggaranya tata kelola sanitasi yang baik dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha	Penyusunan perencanaan pengelolaan air limbah secara terpadu dan komprehensif					Belum terlaksana
	Penyusunan Regulasi sub sektor air limbah tahun 2015					Belum terlaksana
Peningkatan kesadaran masyarakat dan akses layanan terhadap pelayanan infrastruktur air limbah baik on site system maupun off site system didukung sepenuhnya oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha	Meningkatkan jumlah jamban keluarga dari 72% menjadi 85% di tahun 2018, dimana tangki septik aman dari 51,4% menjadi 60%	jumlah RT yang memiliki jamban keluarga				
	Terbangunnya MCK Komunal dari 1,2% menjadi 5% di tahun 2018 di area berisiko sangat tinggi dan berisiko tinggi dari sub sektor air limbah	11 MCK. 22000 jiwa yang terlayani	4 unit	3 unit	6 unit	
	Terbangunnya IPLT untuk skala kota dengan sasaran 32.215 jiwa pada tahun 2016					1 unit IPLT dengan kapasitas 10 m ³
	Pembangunan IPAL Skala Kawasan 5 unit Tahun 2017					Belum terlaksana

Pembangunan IPAL Komunal
Tahun 2017

4 unit
sanimas

2.2.2 Pengelolaan Persampahan

Penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup. Tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA sementara. Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Perda No. 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan persampahan untuk lingkungan pemukiman rumah tangga / individu.

Dalam SSK tahun 2014-2018 ada 5 sasaran yang akan dicapai yaitu Pembangunan TPS3R, Pengoperasian TPA menjadi sanitary landfill, peningkatan cakupan layanan dari 10,74% menjadi 28,06% tahun 2018, Pelaksanaan Perda No. 12 tahun 2012 dan Penyusunan PTMP tahun 2015. Dari sasaran tersebut telah dibangun 3 unit TPS3R tahun 2014-2016 masing-masing 1 unit pertahun di 3 lokasi yaitu Kel. Majjelling, kel. Lakessi dan kel. Rappang. Pengoperasian TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill sejak tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015 cakupan layanan persampahan sudah mencapai 27.66%. pada tahun 2016 adanya penerbitan Perda Persampahan No. 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk penyusunan PTMP sendiri belum dilaksanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2. 6 Kemajuan SSK sektor Persampahan

SSK Tahun 2014-2018			Kemajuan SSK			
Tujuan	Sasaran	Data dasar tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Status saat ini 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengurangan Timbunan Sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya	Peningkatan pemahaman masyarakat akan 3R dan ujicoba pengembangan replikasi 3R di daerah pemukiman Tahun 2014	0 unit	1 unit TPS3R	1 Unit TPS3R	1 Unit TPS3R	
Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan persampahan	Pengoperasian TPA Patommo dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill Tahun 2014	Open dumping	Controlled landfill	Sanitary Landfill	Sanitary Landfill	Sanitary Landfill
	Meningkatkan cakupan layanan dari 10,7% menjadi	10,7%	15%	19,7%	22.3%	27%
Tersusunnya perencanaan dan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif	Mengefektifkan pelaksanaan Perda no. 12 tahun 2012 dan Perbup No. 12 tahun 2012	Target PAD Rp.179.520.000 Realisasi Retribusi Rp.186.529.000	Target PAD Rp.179.464.000 Realisasi Retribusi Rp. 181.217.000	Target PAD Rp.366.474.000 Realisasi Retribusi Rp.211.565.000	Target PAD Rp.366.474.000 Realisasi Retribusi Rp. 240.060.000	Target PAD Rp.366.474.000 Realisasi Retribusi Rp.136.397.000
	Penyusunan dokumen rencana teknis dan manajemen persampahan tahun 2015			Belum Terlaksana		

2.2.3 Drainase perkotaan

Penanganan pengelolaan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup. Pemeliharaan pada prinsipnya diserahkan kepada masyarakat setempat, namun realitas dilapangan porsi terbesar tetap saja menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kelembagaan ditingkat masyarakat hanya bersifat temporer, termasuk ditingkat desa/kelurahan ataupun kecamatan. Dengan fungsi kelembagaan yang masih lemah maka perencanaan program maupun target yang ingin dicapai belum berjalan efektif, perangkat peraturan terkait pengelolaan drainase belum tersedia, hal ini terkait dengan dukungan dana (APBD Kab/Provinsi ataupun APBN) yang masih sangat minim. Demikian juga dukungan dari dunia usaha belum berkembang sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan dokumen SSK tahun 2014-2018 ada 3 sasaran yang menjadi target untuk sub sektor drainase perkotaan yaitu Berkurangnya 50% luas genangan baik di perkotaan maupun di perdesaan Tahun 2018, Terbebasnya Saluran drainase dari sampah untuk meningkatkan fungsi saluran sebagai pemutus air, dan Terjalinnya kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan drainase. Dari ketiga target tersebut telah dilakukan pembangunan 6 Saluran Primer dari 9 Saluran primer dan 1 saluran sekunder. Luas genangan tahun 2013 dari 1455 Ha menjadi 5127,13 Ha. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya pembangunan yang semakin meluas terutama oleh pihak pengembang, perubahan iklim dan belum adanya kolam retensi. Sementara untuk sasaran ketiga yaitu terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum ada ketegasan dalam peraturan yang mengatur tentang pembangunan drainase bagi pihak pengembang di lokasi pembangunan perumahan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2. 7 Kemajuan SSK sektor drainase

SSK Tahun 2014-2018			Kemajuan SSK			
Tujuan	Sasaran	Data dasar tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Status saat ini 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mengurangi luas genangan air baik di perkotaan maupun di perdesaan di Kab. Sidenreng Rappang	Berkurangnya 50% luas genangan baik di perkotaan maupun di perdesaan Tahun 2018	1455 Ha				
Membangun saluran drainase secara terstruktur dan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan	Terbebasnya Saluran drainase dari sampah untuk meningkatkan fungsi saluran sebagai pemutus air	9 SP	SP1 dan SP2	3 SP	2 SP	2 SP
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengelola prasarana dan sarana drainase, swasta/dunia usaha dan peran serta masyarakat	Terjalinnnya kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan drainase	Belum terlaksana secara efektif, mengingat belum ada regulasi yang menegaskan tentang perandankewajiban pihak Pengembang (swasta) dalam pengelolaan drainase				

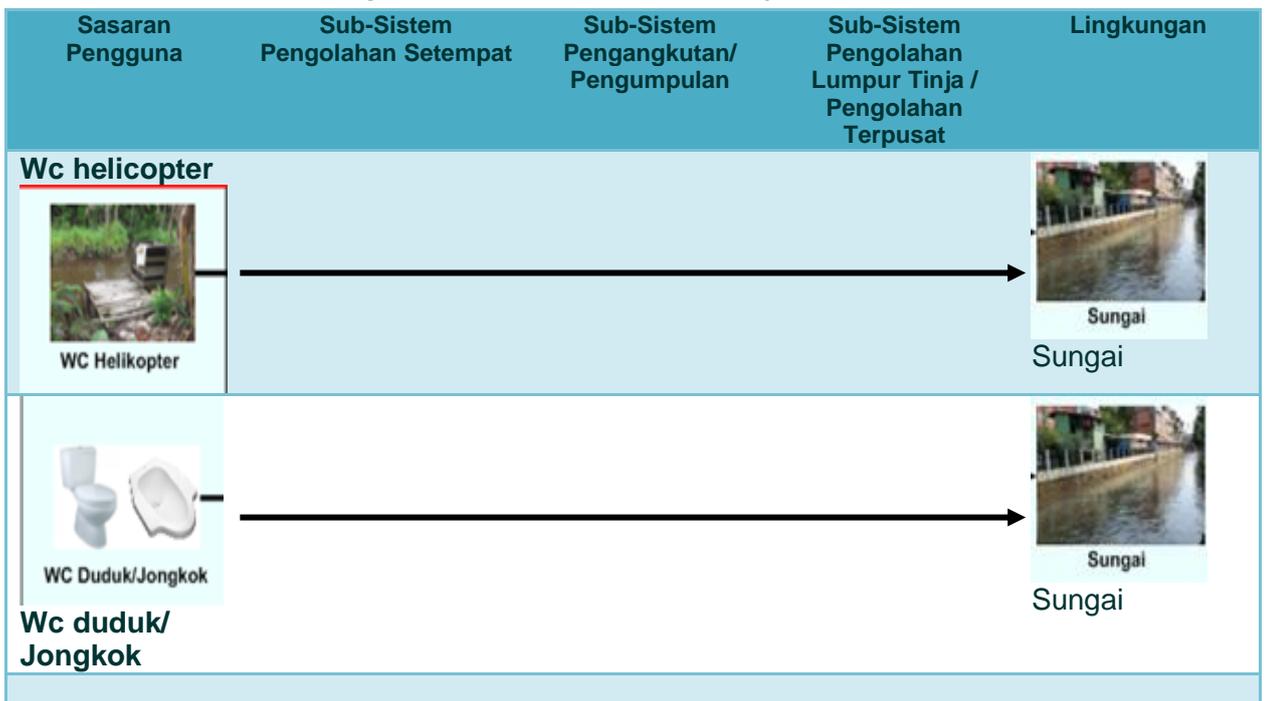
2.3 Profil Sanitasi Saat ini

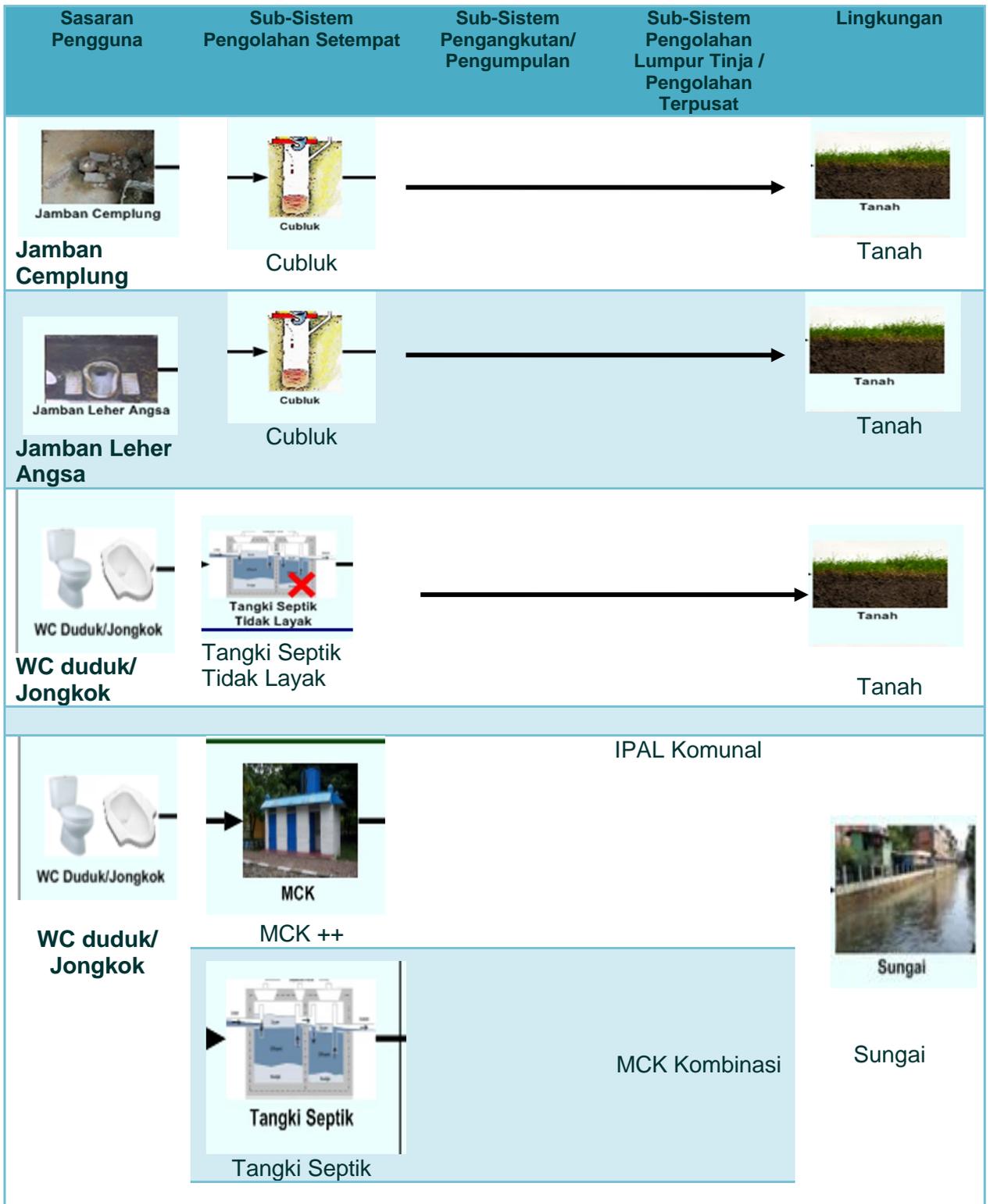
2.3.1 Air limbah domestik

1. Sistem dan infrastruktur

Sistem Pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang ada yang menggunakan tangka septik individu ada pula yang komunal. Sampai dengan tahun 2017 telah dibangun 29 infrastruktur air limbah yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang. Infrastruktur tersebut termasuk katagori SPALD-T skala permukiman yang terdiri dari MCK, MCK Lomenal, MCK ++, IPAL Komunal dnegan kapasitas mulai dari 36 m3 sampai dengan 238 m3. IPLT juga telah dibangun pada tahun 2016 dengan kapasitas 10m3 namun sampai hari ini belum beroperasi. Sistem pengelolaan sanitasi seperti terlihat pda Tabel 2.8

Tabel 2. 8 Diagram sistem sanitasi (DSS) pengelolaan air limbah (IPLT, IPAL terpusat/kawasan, Sanimas, dll)

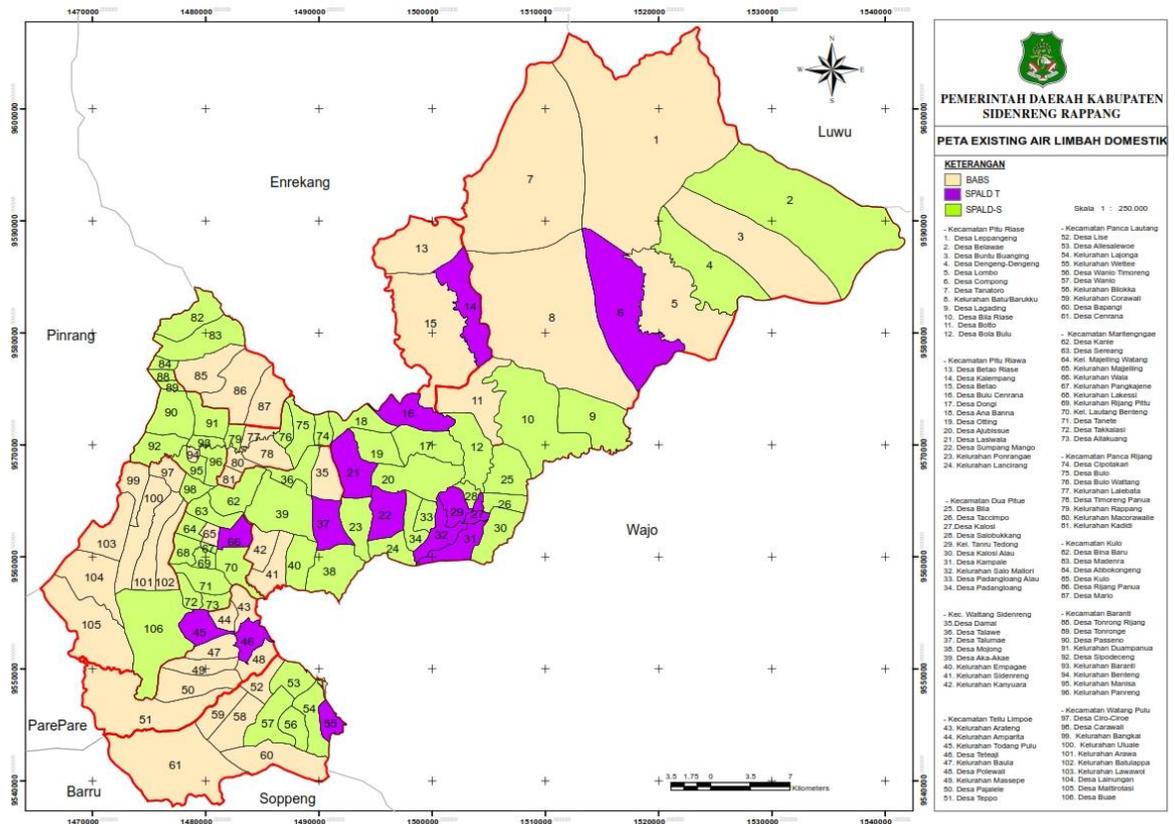




**STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



Cakupan akses layanan air limbah sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa beberapa lokasi masih terdapat BABS yang ditunjukkan pada warna Kuning. Penggunaan SPALD-S cakupan wilayah berwarna hijau dan SPALD-T seperti terlihat pada Gambar 2.4 berwarna ungu



Gambar 2. 4 Peta Cakupan Layanan Air Limbah

Tabel 2. 9 Tabel Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten/Kota
Untuk Klarifikasi Wilayah Perkotaan

No	Kec.	Jml. Penduduk Perkotaan	Tanpa Akses			Akses Layak (KK)					
			BABS (KK)	Cubluk/	SPALD Setempat		SPALD Terpusat				
				Tangki Septik	Skala Individual Tidak Layak (KK)	Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman(6)		IPALD Perkotaan	IPALD Kawasan Tertentu
				Layak (KK)		Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi				
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	
1	Panca Lautang	679	60	6	606	7	-	-	-	-	
2	Tellu Limpoe	3,538	879	12	2,501	112	35	-	-	-	
3	Watang Pulu	5,593	1,069	38	4,182	192	112	-	-	-	
4	Baranti	4,189	29	-	4,147	13	-	-	-	-	
5	Panca Rijang	4,464	126	28	4,307	9	-	-	-	-	
6	Kulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Maritengngae	9,159	358	2,024	6,675	44	59	-	-	-	
8	Watang Sidenreng	658	3	2	640	14	-	-	-	-	
9	Dua Pitue	3,855	76	37	3,604	89	49	-	-	-	

10	Pitu Riawa	1,287	105	5	1,160	17	-	-	-	-
11	Pitu Riase	648	207	32	378	31	-	-	-	-

Tabel 2. 10 Tabel Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten/Kota

Untuk klarifikasi wilayah perdesaan

No	Kec.	Jml. Penduduk Perkotaan	Tanpa Akses			Akses Layak (KK)					
			BABS (KK)	Cubluk/ Tangki Septik	SPALD Setempat		SPALD Terpusat			IPALD Perkotaan	IPALD Kawasan Tertentu
				Individual Tidak Layak (KK)	Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman				
							Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi			
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	
1	Panca Lautang	679	60	6	606	7	-	-	-	-	
2	Tellu Limpoe	3,538	879	12	2,501	112	35	-	-	-	
3	Watang Pulu	5,593	1,069	38	4,182	192	112	-	-	-	
4	Baranti	4,189	29	-	4,147	13	-	-	-	-	
5	Panca Rijang	4,464	126	28	4,307	9	-	-	-	-	
6	Kulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Maritenggae	9,159	358	2,024	6,675	44	59	-	-	-	

8	Watang Sidenreng	658	3	2	640	14	-	-	-	-
9	Dua Pitue	3,855	76	37	3,604	89	49	-	-	-
10	Pitu Riawa	1,287	105	5	1,160	17	-	-	-	-
11	Pitu Riase	648	207	32	378	31	-	-	-	-

2. Kelembagaan dan peraturan

Pengelolaan air limbah domestik non tinja (jenis buangan mandi, cuci) belum ada kelembagaan atau unit usaha tertentu yang berminat. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran pipa (tertutup) atau saluran terbuka, masih banyak ditemui masyarakat membuang air limbah non tinja ke sungai atau saluran drainase terdekat. Pengelolaan limbah non tinja untuk rumah tangga dengan konstruksi rumah panggung umumnya dialirkan langsung dikolong rumah dapur yang pada umumnya tidak memiliki lubang resapan.

Umumnya yang sangat berperan dalam pengelolaan air limbah adalah Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui dana ADD. Peran dari pihak swasta dan masyarakat masih sangat sedikit. Sedangkan sektor sanitasi merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dimana akibat dari sanitasi yang buruk akan berdampak domino bagi masyarakat itu sendiri.

3. Peran serta swasta dan masyarakat

Ditingkat masyarakat sudah ada upaya terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan, baik di dalam perilaku sehari-hari maupun dalam sistem kelembagaan. Hal ini terlihat dari adanya asosiasi terkait sanitasi yang dibentuk pada tahun 2014 yang merupakan lembaga pengelola sektor sanitasi khususnya air limbah. Didalamnya terdapat gabungan beberapa KSM pengelola SANIMAS seperti IPAL KOMUNAL dan MCK ++. Terdapat 36 KSM pengelola sanitasi ditingkat desa/kelurahan.

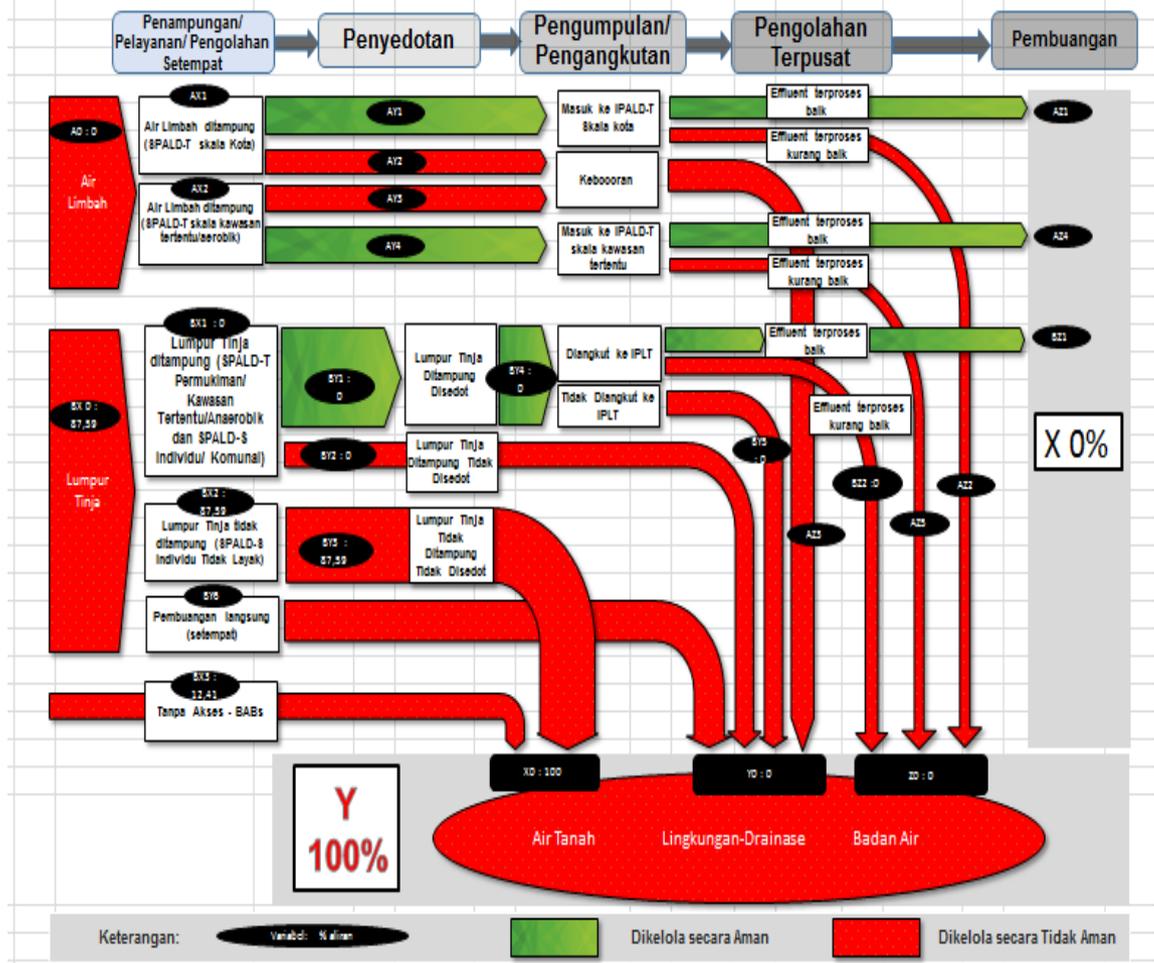
Peran pihak swasta belum ada terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan, baik di dalam perilaku sehari-hari maupun dalam sistem kelembagaan. Hal ini menjadi

kendala dalam perencanaan, program atau upaya pencapaian target pengelolaan air limbah, sehingga otomatis perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah belum tersedia.

Tabel 2. 11 Kondisi sarana Prasarana Air Limbah

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jml	Kapasitas	kondisi		Keterangan	
					berfungsi	Tidak berfungsi		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vii)	(viii)	(x)	
SPALD Terpusat (sistem Off-site)								
1	SPALD-T Permukiman	Berbasis masyarakat	Unit	1	94,5 M3	v		Bangkai
			Unit	1	126 M3	v		Wala
			Unit	3	97,02 M3	v		Talumae/Saloma llori/Wette'e
			Unit	2	108 M3	v		Bulcen/Tanatoro
			Unit	4	81 M3	v		Kalempang/S.Mango/Bt.Lappa/Alakuang
			Unit	1	139,5 M3	v		Teteaji
			Unit	1	50,37 M3	v		Lasiwala
			Unit	1	238 M3	v		Lakessi
			Unit	4	232,5 M3	v		Lakessi Galsar/uluale/Rappang/Benteng
			Unit	1	189 M3	v		Rappang
			Unit	2	84 M3	v		Pangkajene/Baula
			Unit	6	72 M3	v		Corawali/Alesawo/Kanyuara/Dengeng2/Kulo/Bina Baru
			Unit	1	92,8 M3	v		Toddang pulu
			Unit	1	36 M3	v		Lainungan
		Berbasis Institusi	Unit				Belum ada	
2	SPALD-T	Perkotaan	Unit				Belum ada	
3	SPALD-T	Kawasan tertentu	Unit				Belum ada	
Pengelolaan lumpur tinja								

4	Truk Tinja	Unit	-	-	v	Belum ada
5	IPLT Patommo	m3/h ari	1	10	v	Belum berfungsi



Gambar 2. 5 Shit Flow Diagram

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Shif Flow Diagram

Kode	Keterangan	kode SFD	Nilai (%)
A	Air Limbah	a0	0
A1	Air Limbah ditampung (SPALD - T skala kota)	ax1	0
a	Masuk ke IPALD - T skala kota	ay1	0
b	Bocor	ay2	0

Kode	Keterangan	kode SFD	Nilai (%)
i	Effluent terproses baik	az1	0
ii	Effluent tidak terproses baik	az2	0
A2	Air Limbah ditampung (SPALD - T skala kawasan tertentu/aerobik)	ax2	0
a	Masuk ke IPALD - T skala kawasan tertentu	ay4	0
b	Bocor	ay3	0
i	Effluent terproses baik	az4	0
ii	Effluent tidak terproses baik	az5	0
B	Lumpur Tinja	b0	
B1	Lumpur Tinja ditampung	bx1	0
a	Lumpur Tinja ditampung disedot	by1	0
i	Diangkut ke IPLT	by4	0
-	Effluent terproses baik	bz1	0
-	Effluent terproses tidak baik	bz2	0
ii	Tidak diangkut ke IPLT	by5	0
b	Lumpur tinja ditampung tidak disedot?tidak disedot aman	by2	0
B2	Lumpur tinja tidak ditampung (SPALD-S individu tidak layak)	bx2 = by3	87.59
B3	Pembuangan langsung (setempat)	by6	0
C	Tanpa Akses (BABS)	bx3	12.41
TOTAL			100.00
	Pencemaran ke Air Tanah	x0	100
	Pencemaran ke Lingkungan - Drainase	y0	0
	Pencemaran ke Badan Air	z0	0
	Pengelolaan Aman	x	0
	Pengelolaan Tidak Aman	y	100

2.3.2 Persampahan

1. Sistem dan Infrastruktur

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pengelolaan dari sumber sampah sampai dengan TPS, pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dan pengelolaan sampah di TPA.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Masyarakat membuang sendiri sampahnya di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang telah disediakan di wilayah masing-masing
2. Sampah yang telah terkumpul dari TPS sampah akan di jemput oleh petugas yang menggunakan mobil dump truk/arm roll setiap saat.
3. Sampah dari sumber (permukiman) yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 6 (enam) di jemput langsung oleh petugas yang menggunakan motor tiga roda (Matora).
4. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya dikumpulkan di TPS kemudian di jemput oleh petugas.

A. Pola Pelayanan

Ada lima pola pelayanan persampahan yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk rumah tangga, jalan, taman/hutan kota, drainase dan pasar :

1. Pola layanan untuk sampah rumah tangga

Sampah dikumpulkan oleh penghasil sampah pada wadah sampah (tong sampah, kantong kresek, keranjang bekas dll) yang ditempatkan dipinggir jalan, kemudian petugas memindahkan sampah ke alat angkut (dump truk dan Matora) dan kemudian diangkut ke TPS 3R dan ada pula yang langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

2. Pola layanan untuk sampah jalan

Sampah jalan disapu oleh pengelola (petugas) kemudian tumpukan sampah tersebut dipindahkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

3. Pola layanan untuk taman kota/hutan kota

Sampah taman dan hutan kota berupa sampah daun, ranting, rumput dan sisa-sisa makanan dari pengunjung di kumpulkan oleh pengelola (petugas) kemudian tumpukan sampah tersebut dipindahkan ke TPS yang telah ada.

4. Pola layanan untuk pasar

Sampah pasar disapu dan dikumpulkan oleh pengelola (petugas) kemudian dikumpulkan ke kontener sampah yang telah disiapkan di lokasi pasar dan selanjutnya diangkat dengan menggunakan mobil arm roll.

5. Pola layanan untuk saluran drainase

Petugas pemeliharaan drainase membersihkan saluran (sedimen, sampah plastik dll) kemudian dikumpulkan dipinggir saluran dan dipindahkan ke dalam mobil 4(empat) roda (khusus untuk sampah saluran drainase) diangkat ke TPA sampah.

B. Pengangkutan

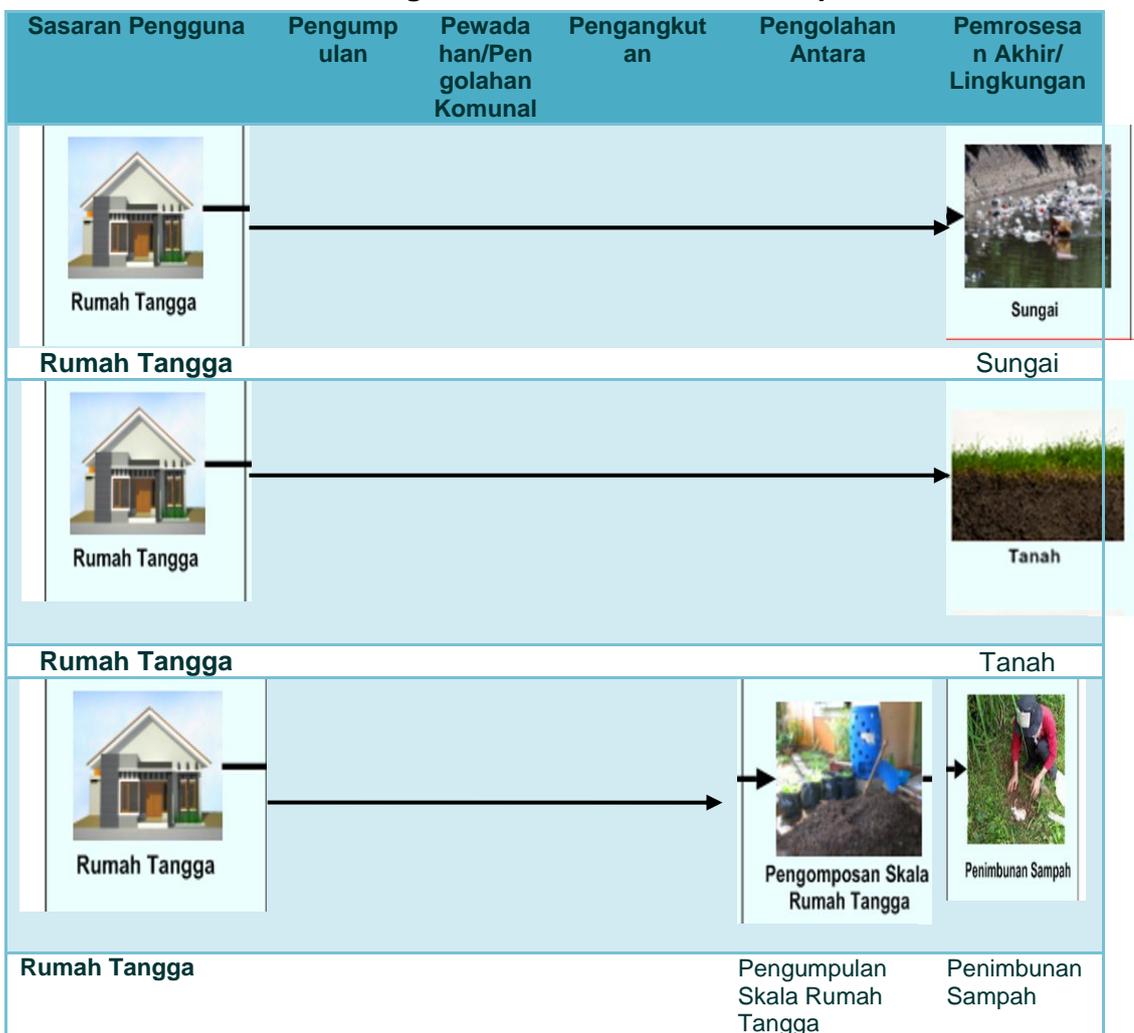
Ada tiga jenis alat angkut yang digunakan dalam pelayanan persampahan yaitu

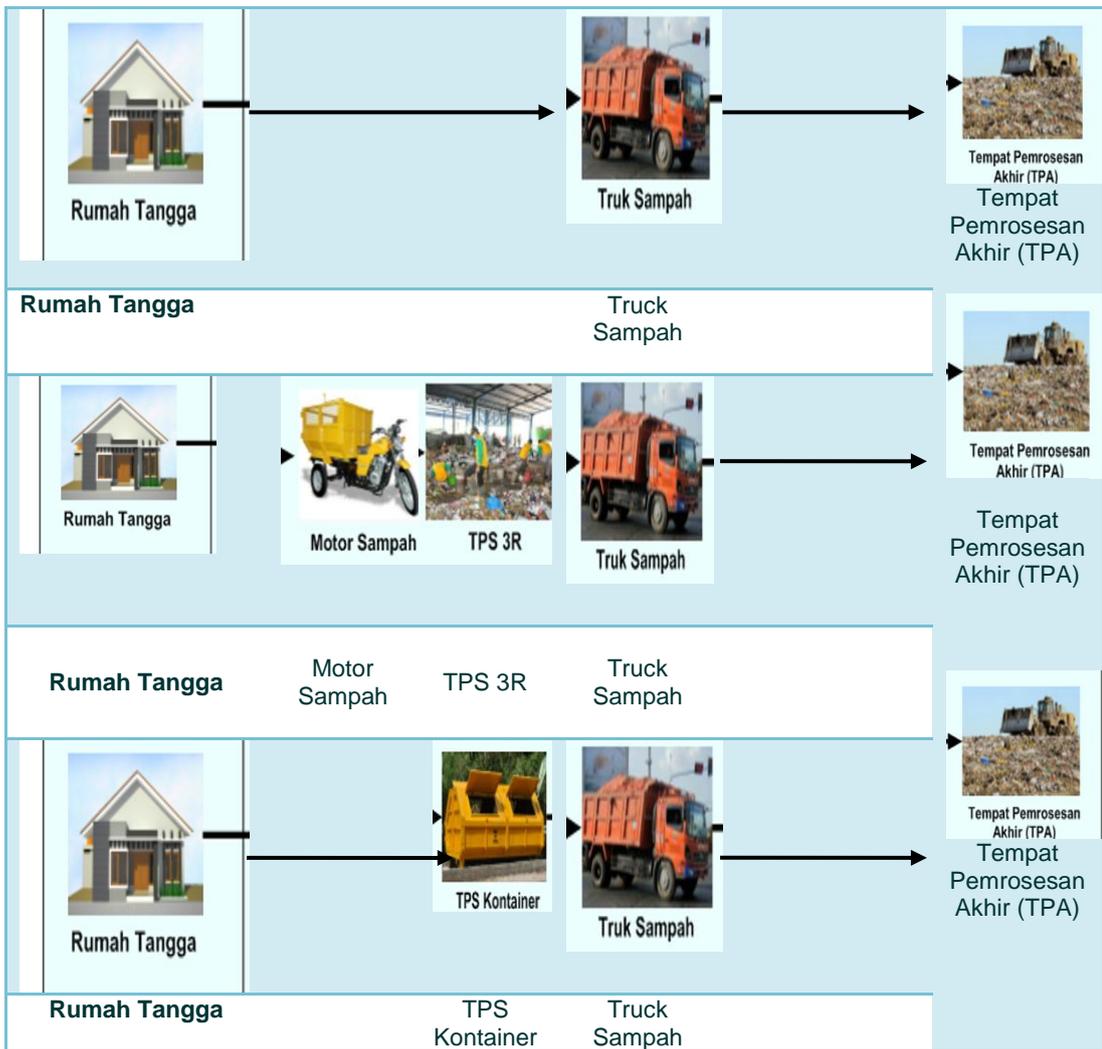
- a. Kendaraan roda 6(enam) adalah kendaraan yang digunakan sejenis dump truk dan arm roll dengan jumlah 10 unit yang terdiri dari 4 unit dump truk dengan tahun perakitan 1990an dan 6 unit arm roll dengan tahun perakitan 1990an sampai 2012 yang masing-masing kapasitas angkutan $4m^3$. Seluruh armada tersebut dioperasikan setiap hari oleh 11 sopir dan 40 petugas sampah.
- b. Kendaraan roda 4(empat) adalah kendaraan yang sejenis pick up yang melayani untuk sampah dengan jumlah 1 unit dengan umur kendaraan sudah tua (perakitan 1980an) yang dioperasikan setiap hari oleh 1 sopir dengan kapasitas muatan berkisar $2m^3$.

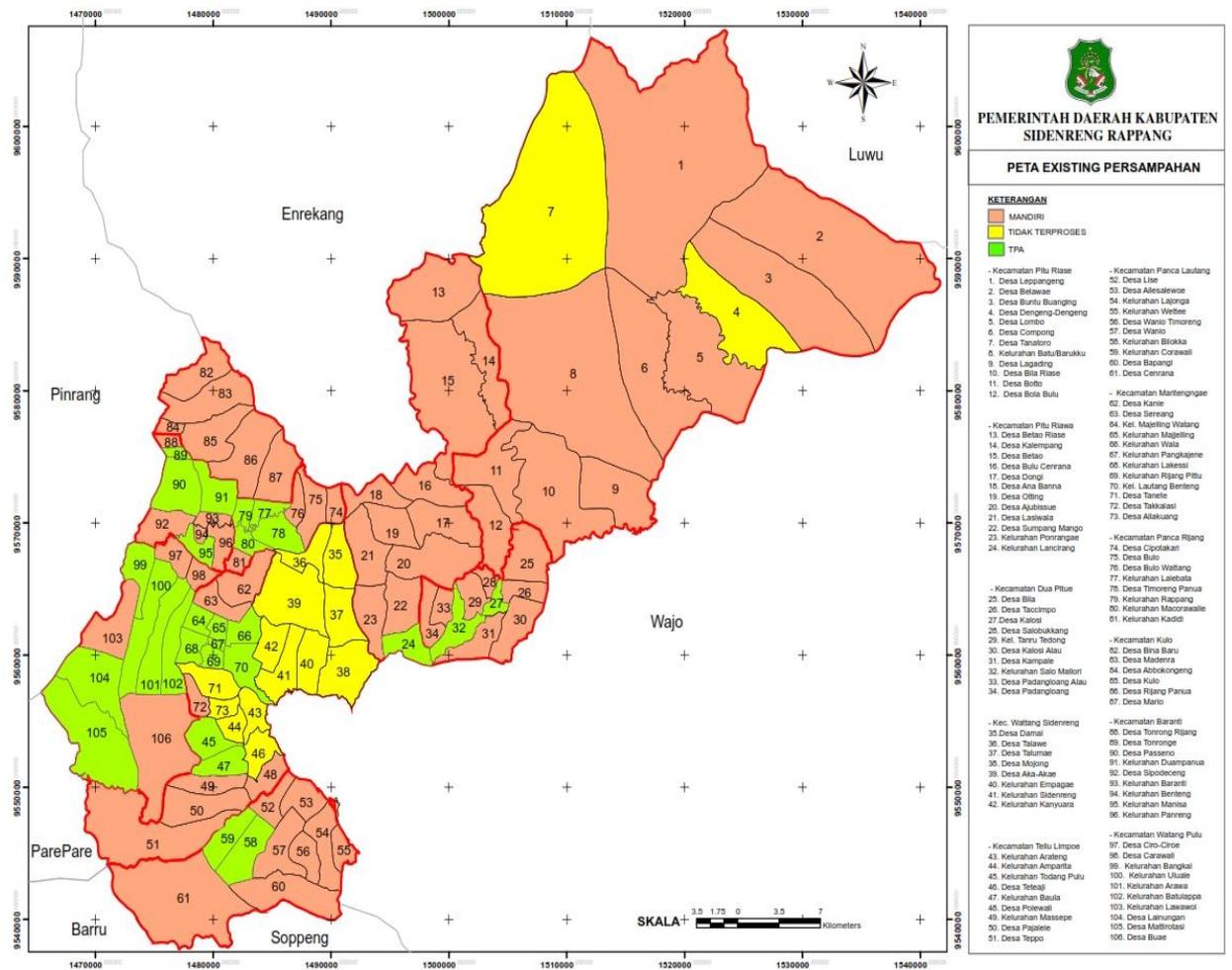
- c. Kendaraan roda 3(tiga) adalah kendaraan yang biasa disebut motor tiga roda (motora) dimana jumlahnya armada 12 unit dioperasikan 12 sopir dan 12 petugas kebersihan dengan jumlah kapasitas muatan 1,5m³.

Jumlah sampah yang terangkut dibuang ke TPA dihitung berdasarkan jumlah angkutan yang masuk ke TPA dan kapasitas angkutan. Kegiatan pendataan dilakukan dengan cara mencatat jumlah armada dan kapasitas angkutan masuk ke TPA setiap hari.

Tabel 2. 13 Diagram Sistem Sanitasi Persampahan







Gambar 2. 6 Peta Cakupan layanan Persampahan

Tabel 2. 14 Penanganan Persampahan Wilayah Perkotaan

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tanpa Akses				Akses Layak				Total	
		Sampah Tidak Terproses		Sampah Dikelola Mandiri		Sampah tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah		Sampah terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)			
		(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)					
Panca Lautang	5,946	3.58	0%	3.05	0%	0.04	0.0%	0.12	0.0%	6.79	100%
Tellu Limpoe	18,962	25.52	4%	8.26	1%	0.07	0.0%	1.53	0.2%	35.375	100%
Watang Pulu	22,371	4.15	1%	16.14	2%	11.15	1.5%	24.49	3.4%	55.9275	100%
Baranti	19,656	12.74	2%	26.38	4%	0.04	0.0%	2.73	0.4%	41.8875	100%
Panca Rijang	20,847	4.93	1%	13.39	2%	2.32	0.3%	24.00	3.3%	44.64	100%
Kulo	-	0.00	0%	0	0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0	100%
Maritengngae	36,635	2.76	0%	3.06	0%	8.00	1.1%	77.77	10.8%	91.5875	100%
Watang Sidenreng	7,997	5.79	1%	0.75	0%	0.04	0.0%	0.00	0.0%	6.58	100%
Dua Pitue	7,280	13.34	2%	10.95	2%	0.00	0.0%	14.26	2.0%	38.5525	100%
Pitu Riawa	5,149	3.15	0%	7.15	1%	0.00	0.0%	2.57	0.4%	12.8725	100%

Pitu Riase	2,593	5.40	1%	1.02	0%	0.06	0.0%	0.00	0.0%	6.4825	100%
------------	-------	------	----	------	----	------	------	------	------	--------	------

Tabel 2. 15 Penanganan Persampahan Wilayah Perdesaan

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tanpa Akses				Akses Layak				Total	
		Sampah Tidak Terproses		Sampah Dikelola Mandiri		Sampah tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah		Sampah terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)			
		(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)	(m3/hari)	(%)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
Panca Lautang	11,296	24.01	3.32%	11.86	1.64%	0.00	0.00%	0.45	0.06%	36.32	100%
Tellu Limpoe	4,620	18.24	2.52%	5.26	0.73%	0.08	0.01%	0.00	0.00%	23.58	100%
Watang Pulu	11,864	6.74	0.93%	3.94	0.54%	16.58	2.29%	2.40	0.33%	29.66	100%
Baranti	10,107	5.36	0.74%	25.93	3.59%	0.00	0.00%	1.23	0.17%	32.52	100%
Panca Rijang	7,536	11.87	1.64%	14.45	2.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	26.32	100%
Kulo	12,031	7.90	1.09%	22.12	3.06%	0.05	0.01%	0.00	0.00%	30.08	100%
Maritenggae	12,928	10.50	1.45%	16.75	2.32%	5.07	0.70%	0.00	0.00%	32.32	100%
Watang Sidenreng	9,608	22.79	3.15%	14.89	2.06%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37.68	100%
Dua Pitue	21,495	12.01	1.66%	16.38	2.27%	5.00	0.69%	0.00	0.00%	33.39	100%

Pitu Riawa	20,835	20.65	2.86%	31.36	4.34%	0.08	0.01%	0.00	0.00%	52.09	100%
Pitu Riase	19,394	36.03	4.98%	12.46	1.72%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	48.49	100%

Tabel 2. 16 Kondisi Prasarana dan sarana persampahan

No	Jenis Prasarana / Sarana	Sat.	Jml	Kapasitas	Rital / hari	kondisi			Keterangan
						Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Pewadahan								
	A. Individual								
	-Bak biasa	unit	0	0	0				
	B. Komunal								
	-Kontainer	unit	35	4 (m3/hari)	70	√			
	-Transfer Depo	unit	0	0	0				
2	Pengumpulan								
	- Gerobak sampah	unit	0	0	0				
	- Motor sampah	unit	16	1,5 (m3/hari)	32	√			
	- Pick up sampah	unit	0	0	0				
3	Pengangkutan								
	- Dump Truck	unit	6	4 (m3/hari)	18	√			
	- Arm Roll Truck	unit	7	4 (m3/hari)	21	√			
	- Compactor Truck	unit	0	0	0				
4	Pengolahan Sampah								
	- TPS 3R	unit	3	48 (m3/hari)	12	√			
	- SPA	unit	0	0	0				
	- ITF	unit	0	0	0				
	- TPST	unit	0	0	0				
	- Bank Sampah	unit	38			√			
	- Incenator	unit	0	0	0				
5	TPA/TPA Regional								- Lahan urug saniter
	- Luas total lahan TPA	Ha	3		-	√			
	- Luas sel <i>Landfill</i>	Ha	2		-	√			- Lahan urug terkendali

No	Jenis Prasarana / Sarana	Sat.	Jml	Kapasitas	Rital / hari	kondisi			Keterangan
						Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
	- Daya tampung TPA	(m3/hari)	1		-	√			- penimbunan terbuka
6	Alat Berat								
	- Buldozer	unit	1		-	√			
	- Exavator / bachoe	unit	1		-	√			
	- Truk Tanah	unit							
7	IPL								
	Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD)				-				Hasil pemeriksaan Lab tulis di bawah ini :
	- Efluen di Inlet							
	- Efluen di Outlet	mg/l						

2. Kelembagaan

Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manajemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota.

Penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Dinas PUTARHUB Bidang Kebersihan dan Keindahan dan tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA sementara. Kondisi dukungan kebijakan bagi

optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini belum memadai.

3. Peran serta masyarakat dan Swasta

Dalam pengelolaan kegiatan pelayanan persampahan, selayaknya selain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup juga bisa dikelola melalui kegiatan kemitraan dengan dunia usaha.

Sampah yang dihasilkan setiap harinya, yang terdiri atas sampah organik dan anorganik, sebelum di bawa ke tempat pemrosesan akhir, seharusnya bisa dipilah terlebih dahulu untuk kemudian di olah kembali sebagai bagian dari proses daur ulang. Dan kegiatan ini bisa melibatkan dunia usaha, karena memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan.

Saat ini, di Kabupaten Sidenreng Rappang program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan dunia usaha belum ada. Tetapi, embrio awal dari proses kemitraan ini telah dilakukan oleh para petugas truck sampah, dimana para petugas tersebut, ketika mengumpulkan sampah untuk di angkut ke atas truk telah melakukan pemilahan terlebih dahulu terhadap sampah yang ada. Para petugas mengumpulkan sampah jenis sampah plastik seperti botol air mineral, botol kaca, kardus bekas dan besi-besi rongsokan yang kemudian dijual ke pengepul yang siap menampung barang-barang bekas tersebut. Sebagaimana terlihat di Tabel 3.28 sudah ada pihak swasta yang mengolah daur ulang kardus menjadi rak telur, serta pemilhan sampah non organik.

Selain itu untuk pengelolaan sampah TPS 3R yang terdapat di 3(tiga) lokasi yaitu kel. Majjelling, kel. Lakessi dan Kel. Rappang dikelola oleh masyarakat melalui KSM di masing-masing lokasi yang dibina oleh Dinas PERA, KP, P&LH

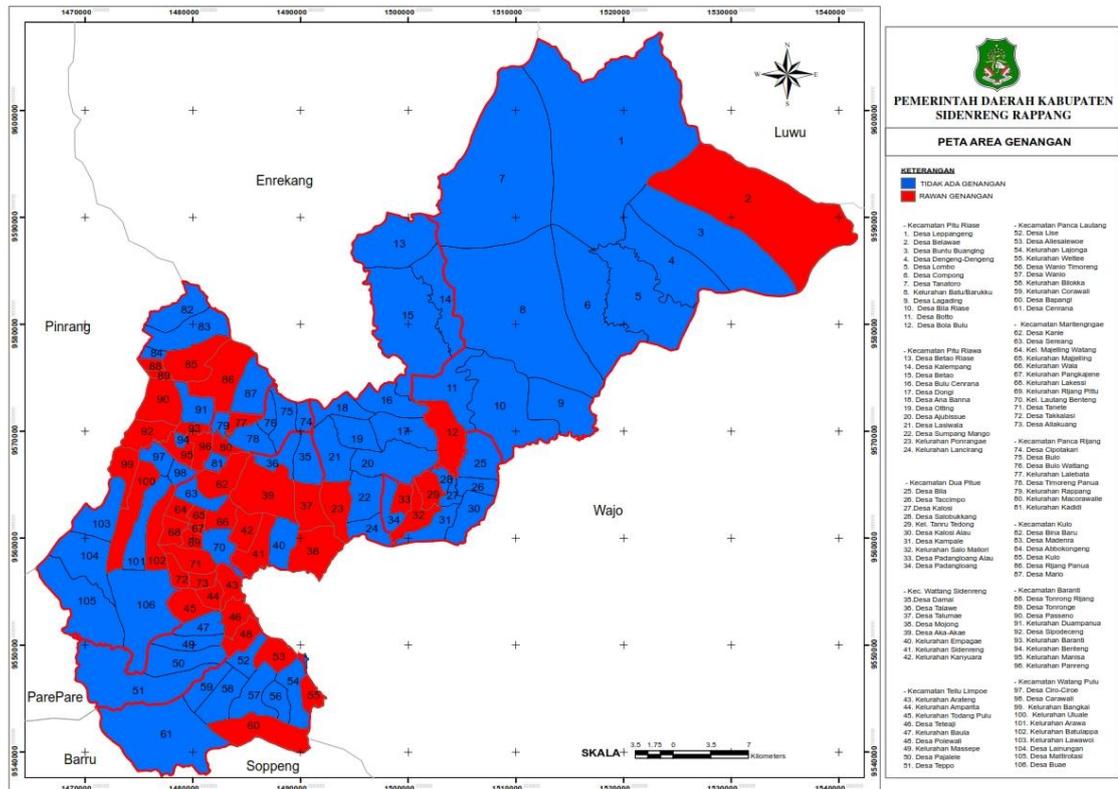
2.3.3 Drainase

1. Sistem dan infrastruktur

Sistem jaringan drainase perkotaan umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu:

- a. **Sistem Drainase Primer**, Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area). Pada umumnya sistem drainase primer ini disebut juga sebagai system saluran pembuangan utama atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase sekunder, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase primer ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini.
- b. **Sistem Drainase Sekunder**, Sistem drainase sekunder yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase sekunder adalah saluran disepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase sekunder ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata gunalahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase sekunder.

Pada Gambar 2.7 Terlihat beberapa lokasi yang memiliki genangan yang ditunjukkan pada warna merah. Meningkatnya luas genangan disebabkan oleh adanya oerubahan iklim dan belum terkendalikannya saat debit puncak musim hujan.



Gambar 2. 7 Peta Area Genangan

Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan (sesuai definisi SPM) pada area terbangun

Tabel 2. 17 Lokasi Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab	Infrastruktur*	
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)		Jenis	Ket.
1	Wette'e	4.7	2	720	4	Luapan air danau	Drainase Lingkungan	
2	Bapangi	2	0.5	72	3	Luapan air danau	Drainase Lingkungan	
3	Allesalewo	3.5	0.5	720	3	Luapan air danau	Drainase Lingkungan	
4	Amparita	3.5	0.5	5	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
5	Arateng	0.01	0.4	5	3	Aliran saluran drainase	Drainase Lingkungan	

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab	Infrastruktur*	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi		Jenis	Ket.
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
						tidak baik		
6	Toddang Pulu	10.00	0.2	6	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
7	Teteaji	0.05	2	3600	3	Luapan air danau	Drainase Lingkungan	
8	Polewali	0.01	0.2	12	3	Luapan air danau	Drainase Lingkungan	
9	Batu Lappa	45	0.5	24	5	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
10	Uluale	3.9	1	3	4	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
11	Bangkai	8.5	0.5	6	4	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
12	Baranti	2	0.3	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
13	Manisa	3.50	0.4	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
14	Panreng	1	0.5	48	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
15	Passeno	1.00	0.3	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
16	Tonronge	1.00	0.5	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
17	Sipodeceng	2.00	0.3	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
18	Tonrong Rijang	3.5	0.2	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
19	Lalebata	15	0.3	3	2	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	

STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab	Infrastruktur*	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi		Jenis	Ket.
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
20	Maccorawalie	10	0.45	12	2	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
21	Kulo	1.3	0.3	3	2	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
22	Rijang Panua	1	0.35	72	2	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
23	Pangkajene	0.10	0.5	3	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Primer, Skunder dan tersier	
24	Rijang Pittu	0.07	0.5	3	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Primer, Skunder dan tersier	
25	Lakessi	1.75	0.8	168	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Primer, Skunder dan tersier	
26	Majjelling	4.05	0.5	3	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Primer, Skunder dan tersier	
27	Majjelling Wattang	1.80	0.3	4	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Primer, Skunder dan tersier	
28	Wala	2.00	0.3	2	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Primer, Skunder dan tersier	
29	Sereang	2.50	0.5	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Primer dan Tersier	
30	Kanie	1.00	0.5	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Tersier/Drinase Lingkungan	
31	Allakuang	0.16	0.5	3	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Tersier/Drinase Lingkungan	
32	Tanete	1.04	0.3	12	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Tersier/Drinase Lingkungan	

STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab	Infrastruktur*	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi		Jenis	Ket.
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
33	Takkalasi	0.04	0.5	3	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Tersier/Drinase Lingkungan	
34	Kanyuara	0.05	0.5	24	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
35	Sidenreng	12	0.5	360	3	Luapan air danau	Drainase Lingkungan	
36	Aka-akae	4	1	48	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
37	Mojong	2.00	0.5	720	3	Luapan air danau	Drainase Lingkungan	
38	Talumae	5	1	48	3	Aliran saluran drainase tidak baik	Drainase Lingkungan	
39	Tanru Tedong	4.5	0.45	48	3	Luapan air sungai	Drainase Lingkungan	
40	Salomallori	3.5	1	72	3	Luapan air sungai	Drainase Lingkungan	
41	Salo Bukkang	2.5	0.3	48	3	Luapan air sungai	Drainase Lingkungan	
42	Padangloang alau	2	1	48	3	Luapan air sungai	Drainase Lingkungan	
43	Ponrangae	5	0.5	168	3	Saluran drainase tidak ada		Tidak ada saluran
44	Bola Bulu	1	0.5	48	3	Saluran drainase tidak ada		Tidak ada saluran
45	Belawae	1.3	1.5	48	3	Saluran drainase tidak ada		Tidak ada saluran

c. Kelembagaan

Penanganan pengelolaan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup dan Dinas

PUTARHUB. Pemeliharaan pada prinsipnya diserahkan kepada masyarakat setempat, namun realitas dilapangan porsi terbesar tetap saja menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kelembagaan ditingkat masyarakat hanya bersifat temporer, termasuk ditingkat desa/kelurahan ataupun kecamatan. Dengan fungsi kelembagaan yang masih lemah maka perencanaan program maupun target yang ingin dicapai belum berjalan efektif, perangkat peraturan terkait pengelolaan drainase belum tersedia, hal ini terkait dengan dukungan dana (APBD Kab/Provinsi ataupun APBN) yang masih sangat minim. Demikian juga dukungan dari dunia usaha belum berkembang sebagaimana diharapkan

d. Peran serta masyarakat

Masyarakat / pihak swasta dalam peranan penanganan drainase masih terbatas, terutama pada lingkungan perumahan pribadi. Sehingga diharapkan semua pihak terutama pemangku kebijakan melakukan kesepakatan / kesediaan untuk aktif dalam pembangunan organisasi pengelola / pemeliharaan saluran drainase permukiman seperti: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / PKK.

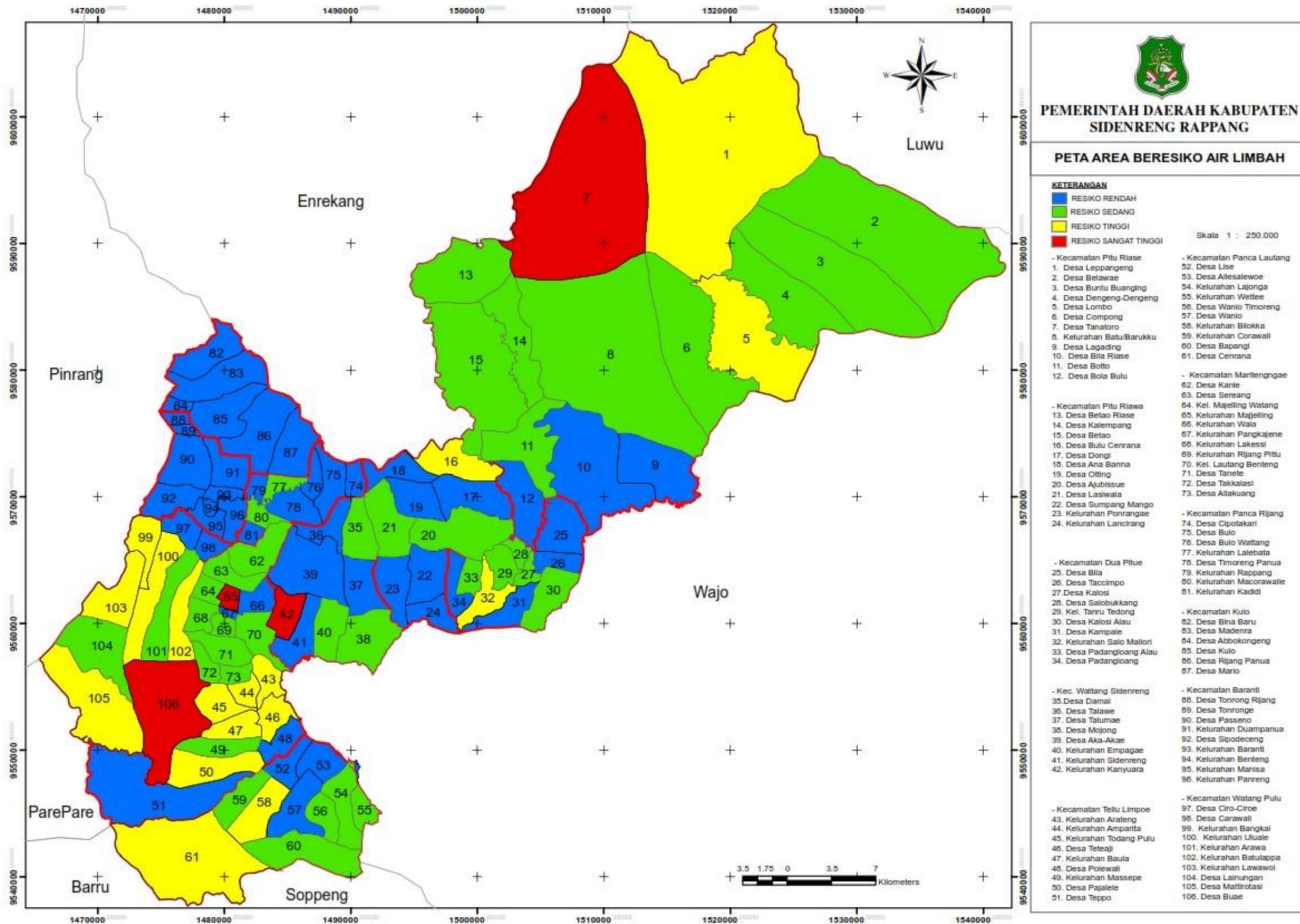
2.4 Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan pengelolaan limbah domestik.
- Penanganan limbah cair tidak lepas dari cara berpikir dan kebiasaan/perilaku masyarakat. Disamping itu masalah ekonomi/tingkat kesejahteraan dan pengetahuan mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang tidak ramah dan mencemari lingkungannya. Penduduk masih membuang limbah cair rumah tangganya ke saluran drainase yang pada ujungnya masuk/mengalir ke sungai.

- Belum adanya mobil truk tinja.
- IPLT yang belum berfungsi.
- Belum adanya regulasi pemerintah daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah.
- Masih ada masyarakat yang BABS (buang air besar sembarangan)
- SDM yang mengoperasikan IPLT belum siap

Berdasarkan data dari Instrumen SSK terdapat 4 desa/kelurahan yang berada di Area Berisiko 4 atau berisiko tinggi yang tersebar di 4 kecamatan. Hal ini dipicu oleh kepadatan penduduk, kawasan kumuh dan keterbatasan prasarana infrastruktur air limbah serta tingkat kesadaran yang rendah akan pentingnya prasarana air limbah seperti terlihat di Tabel 2.18. Untuk area berisiko 3 atau berisiko tinggi terdapat 18 desa/kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan.



Gambar 2.8 Peta Area Berisiko Air Limbah

Tabel 2. 18 Area Berisiko Air Limbah Domestik

No.	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Desa/kelurahan
1	Risiko 4	Watangpulu	Buae
		Maritengngae	Majjelling
		Watang Sidenreng	Kanyuara
		Pitu Riase	Tanatoro
2	Risiko 3	Panca lautang	Bapangi
			Cenrana
		Tellu Limpoe	Amparita
			Arateng
			Toddang Pulu
			Baula
	Risiko 3	Watangpulu	Pajalele
			Teteaji
			Batulappa
			Mattirotasi
			Lawawoi
			Uluale
			Bangkai
	Maritengngae	Wala	
	Dua Pittue	Salo Mallori	
	Pitu Riawa	Bulu Cenrana	
	Pitu Riase	Leppangeng	
		Lombo	

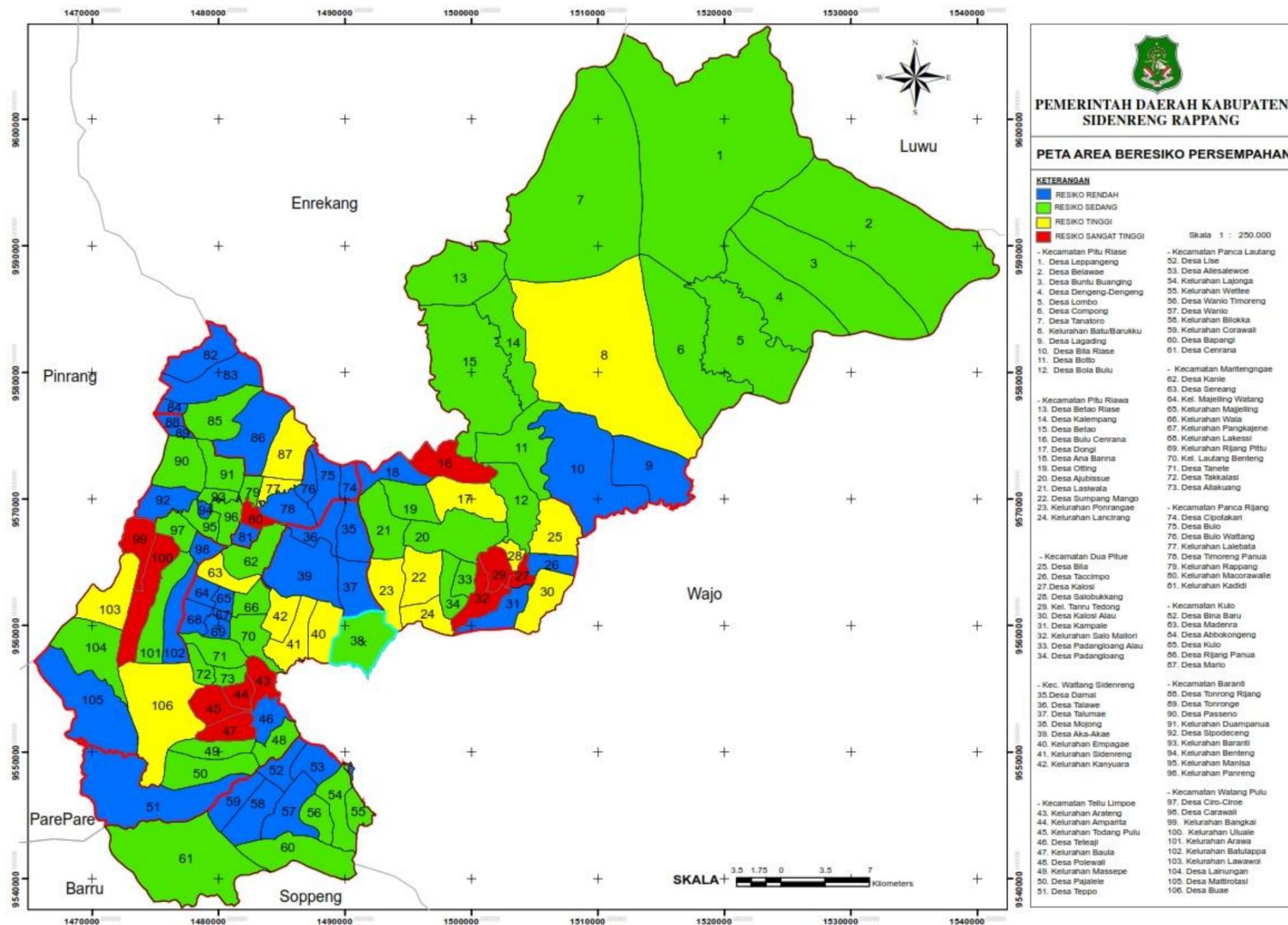
Berdasarkan hasil Instrumen SSK maka ada beberapa permasalahan mendesak yang dirumuskan yaitu masih adanya BABS sebesar 5,1% di perkotaan dan 7,3% di Perdesaan. Hal ini menjadi tantangan dalam menghadapi Universal Access 100 0 100 tahun 2019, dimana Kab. Sidrap baru mencapai 77.9% akses layak dan akses dasar sebesar 6.66% khusus diperdesaan. masih ada akses terhadap jamban yang tidak layak diperkotaan sebesar 3.02% namun hal ini dianggap tanpa akses. Selain itu permasalahan mendesak lainnya adalah operasional IPLT belum terlaksana mengingat keterbatasan anggaran APBD, belum ada truck tinja serta tenaga pengelola IPLT yang belum terlatih. Aspek non

teknis adalah belum adanya regulasi mengenai pengelolaan air limbah, minimnya promosi mengenai air limbah yang layak. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2. 19 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

No	Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	BABS 12,4% (8971 KK); 4,03% (3707 KK) di perkotaan ; 8,38% (5264 KK) di perdesaan
2	Akses terhadap jamban yang tidak layak 9,7% (6977 KK); 4,3% (3081 KK) di perkotaan dan 5,4% (3916 KK) di perdesaan
3	Belum ada truck tinja
4	IPLT belum beroperasi
5	Belum ada masterplan air limbah
6	Akses terhadap SPALD-T 0,84% (608 KK)
7	
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan dan kebijakan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi dan media, Sanitasi sekolah	
1	Belum ada regulasi mengenai pengelolaan air limbah
2	Masih rendahnya pendanaan di sektor air limbah domestik
3	Promosi mengenai air limbah melalui media masih kurang
4	Belum ada tenaga terampil untuk pengelola IPLT
5	Dari 36 KSM pengelola infrastruktur air limbah domestik hanya 21 KSM yang berjalan dengan baik, sisanya tidak berjalan

Untuk sub sektor persampahan area sangat berisiko atau risiko 4 terdapat 8 desa/kelurahan dimana di kec. Tellu limpoe terdapat 4 kelurahan. Hal ini disebabkan kawasan kumuh, kurangnya infrastruktur persampahan, minimnya pelayanan persampahan dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. Untuk area berisiko tinggi atau Risiko 3 terdapat 23 desa/kelurahan yang tersebar di hamper seluruh wilayah kecamatan kecuali Panca Rijang, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan Tabel 2.20.



Gambar 2.9 Peta Area Berisiko Persampahan

Tabel 2. 20 Area Berisiko Persampahan

No.	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Desa/kelurahan
1.	Risiko 4	Tellu Limpoe	Amparita
			Arateng
			Toddang Pulu
			Baula
			Uluale
		Watangpulu	Maccorawalie
		Pancarijang	Tanru tedong
		Dua Pittue	Salo Mallori
			Kalosi
			Bulu Cenrana
2.	Risiko 3	Panca lautang	Bilokka
		Tellu Limpoe	Teteaji
		Watangpulu	Buae
			Lawawoi
		Panca rijang	Lalebata
		Kulo	Mario
		Maritengngae	Sereang
		Watang Sidenreng	Kanyuara
			Empagae
			Sidenreng
		Dua Pittue	Salo Buk kang
			Kalosi Alau
		Pitu Riawa	Bila
			Lancirang
Pitu Riase	Ponrangae		
	Batu		
	Leppangeng		
	Tanatoro		
	Lombo		

Untuk sub sektor persampahan permasalahan mendesak yang dihadapi masih adanya sampah yang belum terproses yaitu di perkotaan 11.25% dan di perdesaan 24.35%. Daya tampung TPA 198m³/hari sementara produksi sampah mencapai 433.87m³/hari. Di TPS3R sendiri hanya mampu mengolah sampah 48

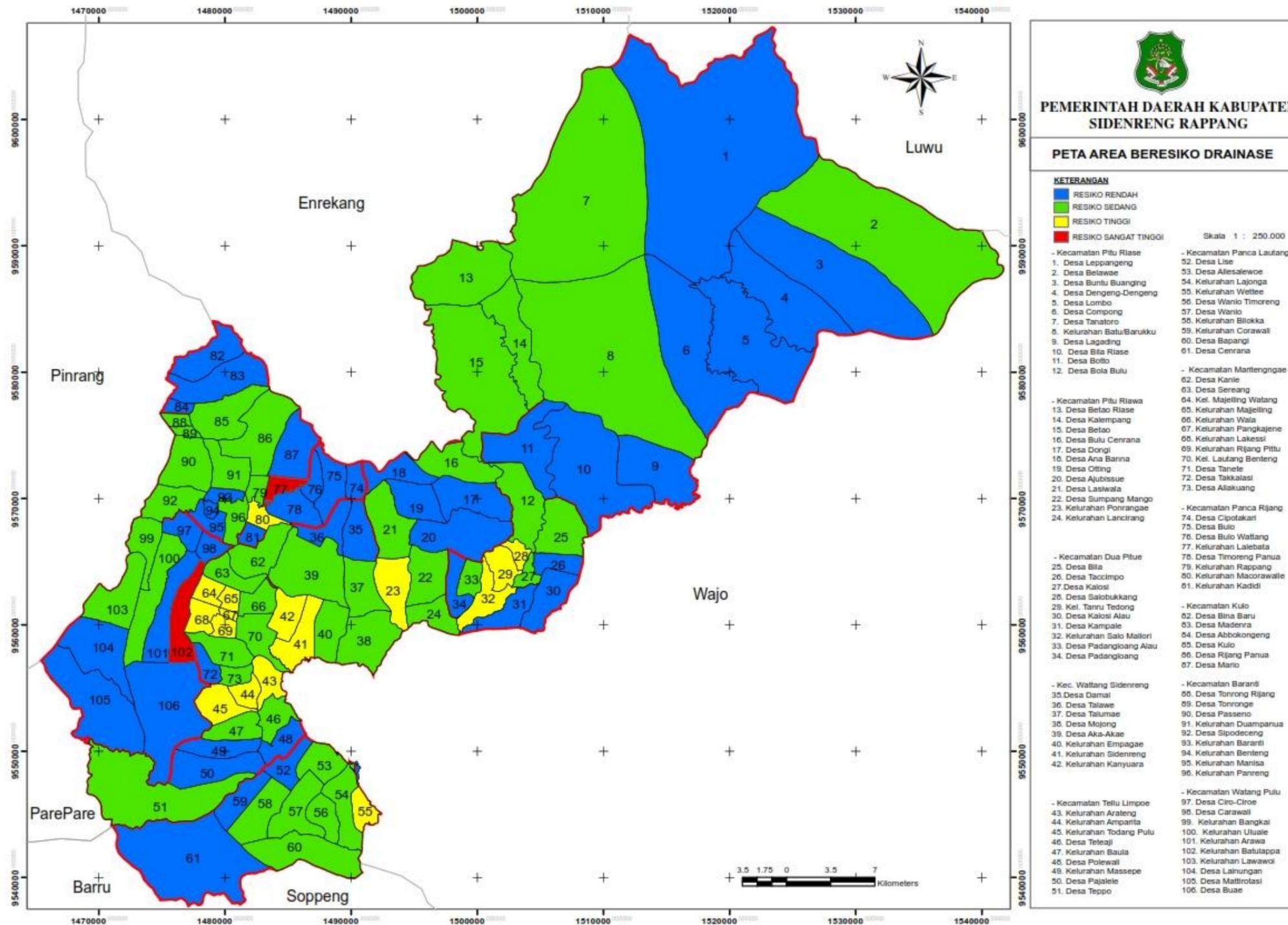
m3/hari. Untuk non teknis jumlah pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan persampahan, Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan masih sangat rendah, Promosi mengenai pengelolaan persampahan melalui media masih kurang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21

Tabel 2. 21 Permasalahan Mendesak Persampahan

No	Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, persampahan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Pelayanan sampah berupa pengangkutan ke TPA masih 20.39 % untuk perkotaan dan 0.56%
2	Masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat 35.60% dimana di Perkotaan 11.25% di perdesaan 24.35%
3	Pelayanan sampah yang berbasis masyarakat baru 6,71 % yang terdiri atas 3,00 % di perkotaan dan 3,71 % di perdesaan
4	Jumlah Armada pengangkutan sampah masih sangat kurang terdiri dari 6 unit dumptruck, 7 unit armroll dan 16 Motor Tiga Roda untuk pelayanan di 5 kota kecamatan sehingga pelayanan sangat terbatas
5	Daya tampung TPA 198 m3/hari, sementara jumlah sampah yang diproduksi 433,87 m3/hr
6	Terdapat 3 TPS 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang namun sampah yang mampu dikelola hanya sebesar 48 m3/hr
7	Belum ada dokumen Pengelolaan Terpadu Manajemen Persampahan (PTMP)
8	Kondisi infrastruktur persampahan khususnya TPS 3R masih sangat membutuhkan penambahan fasilitas
9	Jumlah Bank sampah masih sangat kurang yaitu 38 unit
10	Sudah banyak TPS yang tidak berfungsi
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan dan kebijakan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi dan media, Sanitasi sekolah	
1	Masih banyak masyarakat yang membiarkan sampah/ membuang sampah langsung ke tanah dan sungai
2	Masih rendahnya pendanaan di sektor persampahan
3	Promosi mengenai pengelolaan persampahan melalui media masih kurang
4	Masyarakat yang memanfaatkan bank sampah masih sangat minim
5	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemilahan sampah dengan cara 3R
6	Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan masih sangat rendah
7	Belum efektifnya pelaksanaan regulasi Pengelolaan Persampahan
8	Edukasi terhadap ibu rumah tangga dan anak sekolah tentang pemilahan sampah 3R masih sangat minim

9 Jumlah pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan persampahan

Untuk sub sektor drainase area sangat berisiko atau risiko 4 terdapat 3 desa/kelurahan. Hal ini disebabkan berkembang pesatnya pembangunan perumahan, dan pengaruh banjir dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. Untuk area berisiko tinggi atau Risiko 3 terdapat 2 desa/kelurahan yaitu Kel. Maccorawalie dan Kel. Ponrangae selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2. 10 dan Tabel 2.22.



Gambar 2.10 Peta Area Berisiko Drainase

Tabel 2. 22 Area Berisiko Drainase Perkotaan

No.	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Desa/kelurahan
1	Risiko 4	Watangpulu	Batulappa
		Pancarijang	Lalebata
2	Risiko 3	Pancarijang	Maccorawalie
		Pitu Riawa	Ponrangae
		Maritengngae	Pangkajene
			Rijang Pittu
			Lakessi
			Majjelling
			Majjelling
			Wattang
			Wala
			Watang Sidenreng
		Sidenreng	
	Dua Pitue	Tanru Tedong	
		Salo Mallori	
	Pitu Riawa	Salobukkang	
		Ponrangae	
		Bulu Cenrana	

Permasalahan mendesak di sub sektor drainase adalah Dokumen masterplan drainase hanya untuk Kecamatan Maritengngae dan belum pernah di review sejak penyusunannya tahun 2013 selain itu terjadi peningkatan luas genangan dari 1455 Ha menjadi 5127,13 Ha. Permasalahan lainnya adalah peningkatan kepadatan penduduk dan perkembangan kota mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan yang berpotensi meningkatkan debit banjir. Adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase membuang sampah di saluran drainase, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23

Tabel 2. 23 Permasalahan Mendesak Drainase Perkotaan

No	Permasalahan Mendesak
1.	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana drainase primer, sekunder dan tersier serta ketersediaan

Dokumen Perencanaan Teknis

- 1 Dokumen masterplan drainase hanya untuk Kecamatan Maritengngae dan belum pernah di review sejak penyusunannya tahun 2013
- 2 Luas genangan 179.83 Ha
- 3 Tingginya sedimentasi di saluran drainase akibat kurangnya pemeliharaan
- 4 Perencanaan drainase belum memperhatikan elevasi pengaliran / belum tersistem.
- 5 Metode pemeliharaan saluran drainase masih menggunakan tenaga manual

6

2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan dan kebijakan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi dan media, Sanitasi sekolah

- 1 Masih banyak masyarakat yang membiarkan sampah/ membuang sampah di saluran drainase
- 2 Kurangnya dukungan pendanaan di sektor drainase terutama dari pusat
- 3 Promosi mengenai pemeliharaan drainase melalui media masih kurang
- 4 Belum ada peran serta pihak swasta dalam pengelolaan drainase
- 5 Rendahnya peran serta tokoh masyarakat dalam pemeliharaan drainase
- 6 Peningkatan kepadatan penduduk dan perkembangan kota mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan yang berpotensi meningkatkan debit banjir
- 7 Adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainasembuang sampah di saluran drainase

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Dalam melakukan perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang ini terlebih dahulu ditentukan visi dan misi sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana rumusan visi dan misi sanitasi berkaitan erat dengan visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2018 Kabupaten Sidenreng Rappang. Visi dan misi sanitasi dibuat untuk memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan sanitasi. Rumusan visi dan misi sanitasi merupakan hasil kolaborasi pemikiran para anggota Pokja AMPL Kabupaten Sidenreng Rappang yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disepakati bersama. Dalam Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yaitu **Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat.**

Gambaran Visi dan Misi sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

Visi Kab.Sidenreng Rappang	Misi Kab.Sidenreng Rappang	Visi Sanitasi Kab.Sidenreng Rappang	Misi Sanitasi Kab. Sidenreng Rappang
<p>Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan 2.Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM 3.Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan 4.Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah 	<p>Terwujudnya Sanitasi yang layak dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif menuju Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka tahun 2022</p>	<p><u>Misi Air limbah Domestik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pelayanan Air Limbah Pemukiman kepada masyarakat melalui penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta - Mengembangkan sistem pengelolaan Air Limbah Permukiman yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan - Meningkatkan pengelolaan Air Limbah Permukiman melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia - Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Permukiman - Meningkatkan kesadaran masyarakat

Visi Kab.Sidenreng Rappang	Misi Kab.Sidenreng Rappang	Visi Sanitasi Kab.Sidenreng Rappang	Misi Sanitasi Kab. Sidenreng Rappang
	<p>5.Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif</p> <p>6.Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment</p>		<p>akan pentingnya pengelolaan Air Limbah Permukiman bagi kesehatan dan perlindungan sumber daya air</p> <p><u>Misi Persampahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan - Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan - Meningkatkan layanan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan standar pelayanan minimal sebesar 70% - Meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha - Meningkatkan tata kelola persampahan secara efisien, efektif, cepat dan transparan <p><u>Misi Drainase Perkotaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi 50% areal genangan dengan sistem drainase kota yang terstruktur

Visi Kab.Sidenreng Rappang	Misi Kab.Sidenreng Rappang	Visi Sanitasi Kab.Sidenreng Rappang	Misi Sanitasi Kab. Sidenreng Rappang
			<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan prasarana dan sarana drainase - Membina pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman mendukung pencegahan pencemaran lingkungan - Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yang efektif dan efisien dan bertanggungjawab - Mendorong terciptanya pengaturan berdasarkan hukum yang dapat diterapkan pemerintah dan masyarakat untuk membangun pengelolaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman

3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi

3.2.1 Tahapan Pengembangan sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi dilakukan dalam beberapa tahap yaitu untuk jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun). Dimana dalam penentuan tahapan pengembangan sanitasi dilakukan melalui penetapan sistem dan zona sanitasi untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan program dan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan system yang diusulkan

A. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Indikator yang digunakan dalam tahapan pengembangan dokumen strategi sanitasi ini adalah persentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini.

Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota yang dibagi menjadi wilayah perkotaan dan perdesaan. Tabel tersebut menunjukkan persentase eksisting air limbah domestik serta target jangka pendek, menengah dan panjang dari sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada Permen. PUPR No.04/PRT/M/2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan SPALD Terpusat. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah, pokja dapat menggunakan bantuan Instrumen SSK, dimana dalam instrumen tersebut terdapat tiga kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Kondisi 1 : Pengelolaan dengan Akses Dasar
2. Kondisi 2 : Pengelolaan dengan SPALD Setempat
3. Kondisi 3 : Pengelolaan dengan SPALD Terpusat

Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah.. Akses dasar hanya boleh diterapkan di kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Penerapan akses dasar di perkotaan sudah tidak boleh lagi dilakukan

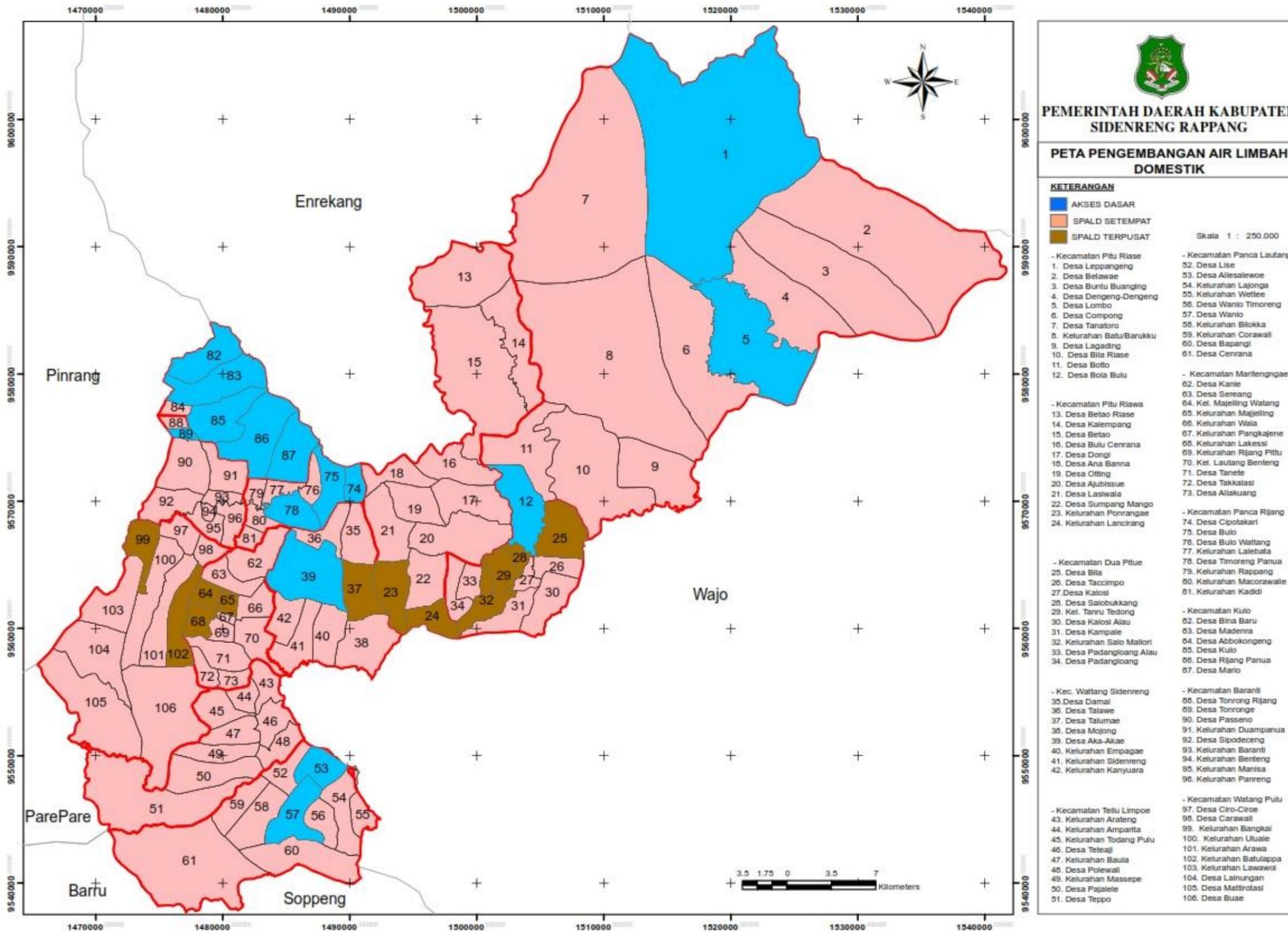
dan masuk dalam kategori tidak layak. Pengelolaan dengan akses dasar pada Instrumen SSK ditujukan untuk mengakomodir 15% pemenuhan akses dasar pada target universal.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Berdasarkan kapasitas pengolahannya SPALD-S terdiri atas:

1. Skala individual diperuntukkan : 1 unit rumah tinggal, Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, jamban bersama, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi
2. Skala komunal diperuntukkan : Dua sampai dengan sepuluh unit rumah tinggal dan/atau bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
2. Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
3. Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun..



Gambar 3. 1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Target pengembangan air limbah domestik adalah stop BABS untuk jangka pendek tahun 2019 adalah 0%. Peningkatan akses layak dari 77.9% menjadi 90% untuk jangka menengah. Untuk perkotaan Akses layak berupa SPALD-S sebesar 39.08% dan SPALD-T sebesar 11.88%. sementara untuk perdesaan SPALD-S 36.63% dan SPALD-T 2.71% dan akses dasar sebesar 9,7%.

Tabel 3. 2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Wilayah Perkotaan					
A	Tanpa Akses				
1	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	4.03%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Cubluk/ Tangki septik individual- tidak layak	3.02%	0.00%	0.00%	0.00%
B	Akses Layak				
B.I	SPALD Setempat				
1	Skala Individual	39.00%	31.50%	19.96%	1.00%
2	Skala Komunal	0.73%	12.70%	19.12%	30.00%
B.II	SPALD Terpusat				
1	SPALD-T Permukiman				
	a. Berbasis Masyarakat	0.35%	6.50%	11.88%	14.50%
	b. Berbasis Institusi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	SPALD-T Perkotaan				
3	SPALD-T Kawasan Tertentu				
Wilayah Perdesaan					
A	Tanpa Akses				
1	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	8.38%	0.00%	0.00%	0.00%
B	Akses Dasar				
1	Cubluk / Tangki Septik individual tidak layak	6.66%	8.50%	9.70%	0.00%
C	Akses Layak				
C.I	SPALD Setempat				
1	Skala Individual	35.50%	28.50%	19.61%	6.50%
2	Skala Komunal	1.85%	10.50%	17.02%	33.00%
C.II	SPALD Terpusat				
1	SPALD-T Permukiman				
	a. Berbasis Masyarakat	0.49%	1.50%	2.71%	7.00%
	b. Berbasis Institusi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	SPALD-T Perkotaan				
3	SPALD-T Kawasan Tertentu				

TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-------	---------	---------	---------	---------

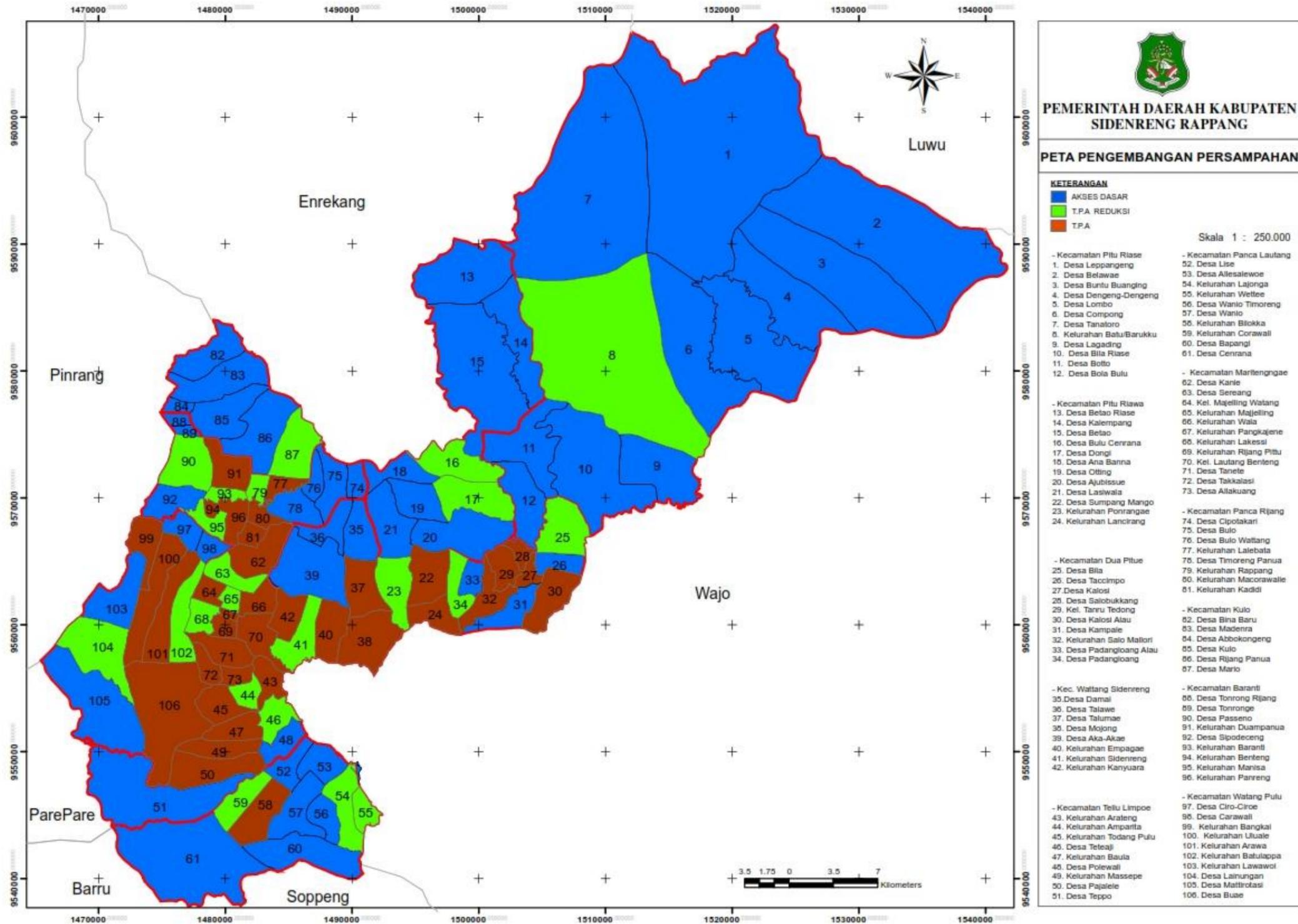
Sumber data: Instrumen SSK

B. Tahapan Pengembangan Persampahan

Dalam menentukan tahapan pengembangan persampahan ada 2 faktor yang menjadi indikator yaitu: tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/ CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah.

Target pengembangan persampahan adalah pengelolaan sampah dari sampah tidak terproses untuk jangka pendek tahun 2019 adalah 15,58% itupun hanya untuk wilayah perdesaan untuk perkotaan sendiri menjadi 0%. Peningkatan akses layak dari 27,66% menjadi 71,57% untuk jangka menengah. Pelayanan ini melalui TPA 57,51% dan TPS-3R 14,06%.

Untuk lebih detailnya, penentuan zona dan sistem sanitasi tahapan pengembangan persampahan dapat dilihat pada peta 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

Tabel 3. 3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Wilayah Perkotaan					
A Tanpa Akses					
1	Sampah Tidak Terproses	11.25%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat	12.47%	10.00%	6.89%	0.00%
B Akses Layak					
1	Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)	20.39%	28.00%	40.60%	50%
2	Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah Wilayah Perdesaan	3.00%	11.68%	12.30%	20%
A Tanpa Akses					
1	Sampah Tidak Terproses	24.35%	15.58%	6.31%	0.00%
B Akses Dasar					
1	Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat	24.26%	23.00%	12.18%	0.00%
C Akses Layak					
1	Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)	0.56%	7.74%	16.91%	20%
2	Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah	3.71%	4.00%	1.76%	10%
TOTAL		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

C. Tahapan Pengembangan Drainase

Dalam pengembangan sub sektor drainase lingkungan memerlukan analisis yang tepat. Ada 5 (lima) indikator yang menjadi acuan dalam menentukan zona dan sistem sanitasi yang tepat agar pengembangan sistem drainase untuk jangka pendek, menengah dan panjang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. 5 (lima) indikator tersebut yaitu : kepadatan penduduk, tata guna lahan (kawasan CBD/komersil atau permukiman), daerah genangan air baik oleh ROB maupun karena air hujan, serta tingkat resiko kesehatan.

Untuk lebih jelasnya, penentuan zona dan sistem sanitasi tahapan pengembangan sub sektor drainase lingkungan dapat dilihat pada peta 2.2 di bawah ini.

Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Sisa luas genangan yang belum tertangani (ha)		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Wette'e	4.7	3	2	0
2	Bapangi	2	1	0	0
3	Allesalewo	3.5	2.45	1.45	0
4	Amparita	3.5	2	1	0
5	Arateng	0.01	0	0	0
6	Toddang Pulu	10	8	6	0
7	Teteaji	0.05	0	0	0
8	Polewali	0.01	0	0	0
9	Batu Lappa	45	40	34	0
10	Uluale	3.9	3	2	0
11	Bangkai	8.5	6.5	4.5	0
12	Baranti	2	1	0	0
13	Manisa	3.5	2.5	1	0
14	Panreng	1	0.7	0	0
15	Passeno	1	1	0	0
16	Tonronge	1	1	0	0
17	Sipodeceng	2	0.5	0	0
18	Tonrong Rijang	3.5	2.5	1.5	0
19	Lalebata	15	12	8	0
20	Maccorawalie	10	7	5	0
21	Kulo	1.3	1.3	0	0
22	Rijang Panua	1	1	0	0
23	Pangkajene	0.1	0	0	0
24	Rijang Pittu	0.07	0	0	0
25	Lakessi	1.75	1.75	0	0
26	Majjelling	4.05	3.05	1.05	0
27	Majjelling Wattang	1.8	1	0	0
28	Wala	2	1	0	0
29	Sereang	2.5	2	1.5	0
30	Kanie	1	1	0	0
31	Allakuang	0.16	0	0	0
32	Tanete	1.04	1.04	0	0
33	Takkalasi	0.04	0	0	0
34	Kanyuara	0.05	0	0	0
35	Sidenreng	12	9.4	5.4	0
36	Aka-akae	4	3	2	0
37	Mojong	2	1	0	0
38	Talumae	5	4	2	0
39	Tanru Tedong	4.5	3	2	0

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Sisa luas genangan yang belum tertangani (ha)		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
40	Salomallori	3.5	2.5	1.5	0
41	Salo Bukkang	2.5	1.75	0	0
42	Padangloang alau	2	2	1	0
43	Ponrangae	5	3	1	0
44	Bola Bulu	1	1	0	0
45	Belawae	1.3	1	0	0

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

A. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Dalam penetapan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan air limbah domestik disusun berdasarkan kerangka kerja logis. Dalam kerangka kerja logis beberapa permasalahan mendesak dan isu strategis dirumuskan berdasarkan Visi Misi Sanitasi 2018-2022 yaitu: Terwujudnya Sanitasi yang layak dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif menuju Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka tahun 2022 dengan Misi air limbah domestik yaitu:

- Meningkatkan akses pelayanan Air Limbah Permukiman kepada masyarakat melalui penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta
- Mengembangkan sistem pengelolaan Air Limbah Permukiman yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan
- Meningkatkan pengelolaan Air Limbah Permukiman melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
- Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Permukiman
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan Air Limbah Permukiman bagi kesehatan dan perlindungan sumber daya air

Berdasarkan Misi diatas maka dirumuskan tujuan dan sasaran air limbah domestik sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Tercapainya akses universal di sub sektor air limbah	Menurunkan angka BABS dari 12.4% menjadi 0% tahun 2019	Masyarakat yang melakukan BABS masih ada 12.4% tahun 2016
	Meningkatkan akses layak menjadi 90% tahun 2022	Masyarakat yang memiliki akses layak 77.9% tahun 2016
Tersusunnya perencanaan air limbah yang terpadu dan terstruktur	Menyusun dokumen perencanaan Master Plan air limbah dan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik tahun 2018	Master Plan telah direncanakan disusun pada tahun 2015 namun belum terealisasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Sudah Ada Peraturan Bupati SIDRAP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa Dan Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri. Dengan Sumber Dana Dari Dana Bagi Hasil PBBP1 P2 65% Tahun Sebelumnya yang mengatur 70% Digunakan Untuk Kegiatan Fisik/Infrastruktur Sanitasi Dan Air Bersih Dan 30% Untuk Kegiatan Non Fisik. - Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa - Peraturan Bupati No. 05 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penyelesaian Target Jamban Keluarga Tahun 2017 Dan Air Bersih Tahun 2018
		Peraturan Bupati terkait pengelolaan air limbah telah direncanakan disusun pada tahun 2015 namun belum terealisasi
	Peran serta KSM, Media dan Tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat dan bersih dengan tidak membuang tinja disembarang tempat di area berisiko sangat tinggi dan berisiko tinggi 54 Desa. Kelurahan Prioritas Tahun 2018	Jumlah desa/kelurahan yang termasuk katagori 4 area sangat berisiko sanitasi adalah desa
	Pemberian Edukasi secara dini melalui penyediaan fasilitas prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi dasar kepada anak sekolah di area berisiko sangat tinggi dan berisiko tinggi 54 Desa. Kelurahan	

B. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan

Dalam penetapan tujuan, sasaran dan strategi persampahan disusun berdasarkan kerangka kerja logis. Dalam kerangka kerja logis beberapa permasalahan mendesak dan isu strategis disusun Misi Pengembangan Persampahan yang yaitu:

- Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan
- Meningkatkan layanan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan target universal akses
- Meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha
- Meningkatkan tata kelola persampahan secara efisien, efektif, cepat dan transparan

Berdasarkan Misi diatas maka dirumuskan tujuan dan sasaran Persampahan sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan Pelayanan angkutan sampah ke TPA dari 7.8% menjadi 25% di Perkotaan Tahun 2019	Pelayanan angkutan sampah ke TPA 20.83% di wilayah perkotaan tahun 2016 dengan jumlah sampah yang terangkut m3/hari, sementara jumlah produksi sampah m3/hari
	Tersusunnya perencanaan dan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif	PTMP telah direncanakan disusun pada tahun 2015 namun belum terealisasi
Pengurangan Timbulan Sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya		Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
	Peningkatan pengolahan sampah di TPS 3R di Perkotaan Tahun 2019	Sudah ada TPS 3R dengan daya tampung 48 m3/hari
	terjalannya komunikasi dan Kampanye sanitasi tentang prohisasi melalui media elektronik	Perkuat komunikasi dan informasi dengan media lokal
	Pelibatan secara aktif tokoh-tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah	
Terjalannya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan	Membangun kemitraan pengelolaan sampah	

C. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase

Dalam penetapan tujuan, sasaran dan strategi persampahan disusun berdasarkan kerangka kerja logis. Dalam kerangka kerja logis beberapa permasalahan mendesak dan isu strategis disusun Misi Pengembangan Drainase yang yaitu:

- Mengurangi 50% areal genangan dengan sistem drainase kota yang terstruktur
- Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan prasarana dan sarana drainase
- Membina pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman mendukung pencegahan pencemaran lingkungan
- Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yang efektif dan efisien dan bertanggungjawab
- Mendorong terciptanya pengaturan berdasarkan hukum yang dapat diterapkan pemerintah dan masyarakat untuk membangun pengelolaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman

Dari rumusan tersebut diatas disusun tujuan strategi dan sasaran sebagaimana dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 7 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Mengoptimalkan fungsi drainase untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang bersih dan berkualitas	Meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pemutus air hujan	Sudah ada pembangunan drainase primer sepanjang km di lokasi sebanyak 6 Saluran Primer dan pembangunan drainase sekunder sepanjang km di lokasi Sudah ada embung/cekdam tetapi masih berfungsi sebagai sumber air irigasi
	Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 50% dari kondisi saat ini	Luas Genangan tahun 2016 179.83 Ha
	Peran serta KSM, Media dan Tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat dan bersih dengan menjaga drainase dari pembuangan sampah	Sudah ada gerakan Pekan Masepe untuk pembersihan saluran secara gotong royong tetapi hanya sekali setahun di jalur2 tertentu Belum ada lembaga masyarakat yang khusus menangani sub sektor drainase
	Terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah	Sudah ada pemeliharaan secara periodik dari Dinas PU per triwulan, tetapi hanya beberapa saluran yang diatur sesuai Pemeliharaan drainase masih bersifat temporer oleh masyarakat
Penegakan hukum mengenai penanganan drainase	Menyusun Perda tentang Penanganan Drainase Tahun 2019	Belumada regulasi khusus terkait penanganan drainase

3.2.3 Skenario Pencapaian sasaran

Skenario pencapaian sasaran sanitasi 5 tahun sebelum tahun perencanaan dan 5 tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 3.8. Untuk sub sektor air limbah memiliki trend yang meningkat dari 67% TAHUN 2012 menjadi 90,3% tahun 2022 untuk akses layak, sementara untuk akses dasar dari 6.7% meningkat di tahun 2018 menjadi 15% kemudian turun menjadi 9,7% tahun 2022.

Untuk sub sektor persampahan diharapkan ada peningkatan dari 19.7% menjadi 69.34%

Tabel 3. 8 Skenario Rencana Pendanaan

Komponen	Tahun						
	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Air Limbah Domestik							
Akses Layak	67%	82%	85%	89.5%	90%	90%	90.3%
Akses Dasar	6.7%	8.5%	15%	10.5%	10%	10%	9.7%
Persampahan							
Akses Layak	19.7%	30.7%	45.54%	51.42%	55.7%	65,3%	69.34%
Akses Dasar	27%	25%	24%	23%	20.2%	18.3%	14.71%
Drainase Perkotaan							
Luas Genangan	20%	8%	7%	6%	5%	4%	3%

Sumber data : Data Olahan Pokja AMPL 2017

3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi daerah

Berdasarkan hasil kajian Keuangan kemampuan pendanaan sanitasi daerah dapat dilihat pada Tabel 3.9. dari hasil kajian tersebut rata-rata pertumbuhan 29.97% secara keseluruhan belanja sanitasi. Kenaikan signifikan pada sub sektor drainase perkotaan dari anggaran Rp. 5,417,857,000,- tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 22,590,874,000,- pada Tahun 2016. Kenaikan pendanaan di drainase perkotaan mengacu pada SSK tahun 2014-2018 untuk pembangunan saluran drainase primer. Persentase pendanaan sanitasi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 3.54%, seiring dengan meningkatnya belanja langsung pada APBD Tahun 2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 702,900,864,000,- meningkat menjadi Rp. 997,255,319,000,- maka pendanaan di sektor sanitasi turut meningkat dari Rp. 27,297,883,000,- menjadi Rp. 31,057,320,000,- namun persentasenya menurun dari 3.54% menjadi 2.65%. Menurunnya pendanaan APBD murni karena adanya intervensi dari Program Prima Kesehatan yang sumber pendanaannya melalui dana bagi hasil PBB sebesar : **Rp. 4.236.303.000,-** dan penggunaan dana ADD APBD. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan kesepakatan Pokja dalam pendanaan sanitasi berdasarkan dokumen SSK tahun 2014-2018 tercapai yaitu dari 2,74% meningkat menjadi 3% selama 5 tahun 2014-2018.

Tabel 3. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi

No.	URAIAN	TAHUN					Rata2 Pertumbuh an
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)	7,308,591,500	7,820,117,700	9,942,176,000	27,297,883,000	31,057,320,000	33.56
1.1	Air Limbah Domestik	1,078,699,000	872,128,000	1,197,440,000	2,671,008,000	2,986,011,000	22.59
1.2	Sampah Rumah Tangga	4,619,231,000	4,009,195,000	3,326,879,000	6,663,637,000	5,480,435,000	3.48

No.	URAIAN	TAHUN					Rata2 Pertumbuh an
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.3	Drainase Perkotaan	1,610,661,500	2,938,794,700	5,417,857,000	17,963,238,000	22,590,874,000	69.58
1.4	PHBS	-	-	-	-	-	-
2	Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)	909,326,000	1,649,056,846	1,690,890,000	2,428,640,000	4,594,482,000	38.26
2.1	DAK Sanitasi	909,326,000	764,478,000	756,620,000	1,133,850,000	2,187,186,000	19.19
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	884,578,846	934,270,000	1,294,790,000	2,407,296,000	28.44
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
	Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3)	6,399,265,500	6,171,060,854	8,251,286,000	24,869,243,000	26,462,838,000	32.83
	Total Belanja Langsung	268,866,408,000	353,877,957,000	463,759,617,000	702,900,864,000	997,255,319,000	29.97
	% APBD Murni terhadap Belanja Langsung	2.38	1.74	1.78	3.54	2.65	2.20
	Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung)						3%

Sumber data : BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang 2012- 2016

.....

STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berdasarkan data pada Tabel 3.9 kemampuan pendanaan APBD Murni untuk Sanitasi tahun 2016 adalah Rp. 26,462,838,000,- , Selanjutnya dari komitmen Pendanaan sanitasi sebesar 3% maka perkiraan besaran pendanaan sanitasi dapat dihitung dengan mengacu pada kemampuan pendanaan APBD murni untuk sanitasi tahun 2017 seperti pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi 2018-2022

No.	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan (Rp)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Perkiraan Belanja Langsung	789,722,666,700	868,694,933,370	955,564,426,707	1,051,120,869,378	1,156,232,956,315	4,821,335,852,470
2	Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi	27,256,723,140	28,074,424,834	26,999,324,921	25,987,838,644	25,037,081,079	133,355,392,618
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan sanitasi	23,691,680,000	26,060,848,000	28,666,933,000	31,533,626,000	34,686,989,000	144,640,076,000

Sumber data : Data Olahan Pokja AMPL 2017

Pada Tabel 3.11 terlihat pertumbuhan pendanaan dari tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 37,7% di sektor sanitasi. Peningkatan yang paling tinggi adalah di sub air limbah sebesar 72,2%, sementara ungu sub sector Persampahan yang paling rendah adalah 15,2%

Tabel 3. 11 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No.	URAIAN	Tahun					Pertumbuhan Rata2 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Belanja Sanitasi	7,820,117,700	9,942,176,000	31,534,186,000	36,312,936,000	38,761,463,000	37.7%
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional/pemeliharaan	872,128,000	1,197,440,000	6,907,311,000	8,241,627,000	13,186,625,000	72.2%
1.2	Sampah Rumah Tangga						
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan	4,009,195,000	3,326,879,000	6,663,637,000	5,480,435,000	8,143,949,000	15.2%
1.3	Drainase Perkotaan						
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan	2,938,794,700	5,417,857,000	17,963,238,000	22,590,874,000	17,430,889,000	42.8%

Sumber data : BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang 2012- 2016

Untuk pendanaan sanitasi berdasarkan trend pertumbuhan 5 tahun sebelumnya maka untuk 5 tahun kedepan tahun 2018-2022 maka total kebutuhan pendanaan tertinggi sub sektor drainase sebesar Rp. 86.658.430.000,- sementara yang terendah di sub sektor persampahan yaitu Rp. 44.534.460.000,- seperti terlihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2022

No.	URAIAN	Tahun					Total pendanaan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi	39,149,080,000	39,540,570,000	25,568,830,000	17,922,590,000	13,755,750,000	135,936,820,000
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional/pemeliharaan	13,318,490,000	13,451,680,000	7,398,420,000	4,069,130,000	2,238,020,000	40,475,740,000
1.2	Sampah Rumah Tangga						
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan	8,225,390,000	8,307,640,000	8,390,720,000	8,474,630,000	8,559,370,000	41,957,750,000
1.3	Drainase Perkotaan						
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan	17,605,200,000	17,781,250,000	9,779,690,000	5,378,830,000	2,958,360,000	53,503,330,000

Sumber data : Data Olahan Pokja AMPL 2017

Tabel 3. 13 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No.	Uraian	Pendanaan (Rp)					Total Pendanaan (Rp)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	71,326	93,657	67,756	74,609	68,237	375,585
2	Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi	39,149	39,540	25,568	17,922	13,755	135,934
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	22,236	20,797	15,043	7,054	6,254	71,384

4	Kemampuan mendanai SSK (APBD Murni (2-1))	-32,177	-54,117	-42,188	-56,687	-54,482	-239,651
5	Kemampuan mendanai SSK (Komitmen (3-1))	-49,090	-72,860	-52,713	-67,555	-61,983	-304,201

Sumber data : Data Olahan Pokja AMPL 2017



STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

4.1. Air Limbah Domestik

Berdasarkan Analisis SWOT maka dirumuskan Strategi di sub sektor Air Limbah Domestik yaitu :

Strategi 1 Peningkatan Layanan Akses layak Air Limbah yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem Air Limbah untuk mencapai Akses Universal di sub sektor air limbah yaitu 0% BABS
- b. Pengembangan pelayanan sistem Air Limbah terpusat SPALD-T di perkotaan secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan (*demand responsive*)
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh OPD
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan kinerja OPD dalam pengelolaan air limbah

Strategi 2 Peningkatan kinerja institusi pengelola air limbah yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dalam pembangunan air limbah.
- b. Meningkatkan manajemen pembangunan air limbah
- c. Meningkatkan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan SDM yang kompeten
- d. Menyusun regulasi yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan air limbah

Strategi 3 Peningkatan kapasitas pendanaan dan pengelolaan yang berbasis masyarakat yaitu :

- a. Mendorong peningkatan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan

berkelanjutan.

- b. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah
- c. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta
- d. Pembangunan dan pengelolaan berbasis masyarakat(pemberdayaan)

Strategi 4 Peningkatan peranserta masyarakat dalam melakukan perilaku hidup sehat dan bersih dengan tidak membuang tinja di sembarang tempat, yaitu :

- a. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui pemberian penghargaan dan sanksi.
- c. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.
- d. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat (*Open Defecation Free*)

4.2. Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan Analisis SWOT maka dirumuskan Strategi di sub sektor Pengelolaan Persampahan yaitu

Strategi 1 Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan yaitu:

- a. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan
- c. meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
- d. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
- e. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan TPA model sanitary landfill

Strategi 2 Mengurangi sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya yaitu :

- f. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga
- g. Mengembangkan dan menerapkan system insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R
- h. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan

Strategi 3: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah 3R sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah
- b. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan 3R kepada masyarakat umum
- c. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah
- d. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- e. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta dalam membangun kemitraan pengelolaan sampah

4.3. Drainase Perkotaan

Berdasarkan Analisis SWOT maka dirumuskan Strategi di sub sektor Drainase Perkotaan yaitu

Strategi 1 Mengembangkan sistem drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan

- a. Mengembangkan sumber pendanaan pembangunan pada simpul-simpul yang tidak tersentuh dari Pemerintah Pusat

- b. Mengembangkan sumber pendanaan melalui retribusi lingkungan

Strategi 2 Memantapkan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air yaitu:

- a. Penyiapan Master Plan Drainase yang terpadu antara sistem Drainase Primer, sekunder, tersier dengan pengaturan dan pengolahan sungai.
- b. Mengembangkan sistem drainase yang berwawasan lingkungan (konservasi air).

Strategi 3 Mengoptimalkan sistem yang ada, rehabilitasi/pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan baru yaitu :

- a. Pengembangan kapasitas operasi & pemeliharaan sarana & prasarana terbangun.
- b. Penyiapan prioritas optimalisasi sistem
- c. Pengembangan kampanye peningkatan peran masyarakat.

Strategi 4 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola prasarana dan sarana drainase, swasta/dunia usaha dan peran serta masyarakat yaitu:

- a. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait
- b. Pengembangan kapasitas SDM pengelola Drainase
- c. Mendorong swasta/masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan drainase
- d. Menyusun Peraturan Daerah tentang penanganan drainase

BAB V KERANGKA KERJA LOGIS

5.1. Matriks KKL Pengelolaan Air Limbah Domestik

Untuk dapat merumuskan Kerangka Kerja Logis (KKL) Sub Sektor Air Limbah berdasarkan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. Alur pikir kebijakan pembangunan sanitasi permukiman sub sektor Air Limbah Domestik, ditunjukkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air limbah domestik

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masih ada BABS 12,4% (8971 KK); 4% (2912 KK) di perkotaan ; 8.4% (6059KK) di perdesaan	Tingkat pelayanan Air Limbah Permukiman di perkotaan yang layak melalui dan melalui jamban (pribadi dan fasilitas umum) dan untuk perdesaan	Tercapainya akses universal di sub sektor air limbah	Menurunkan angka BABS dari 12.4% menjadi 0% tahun 2019	Peningkatan layanan akses layak Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja air minum dan air limbah	Perencanaan Pembangunan Prasarana Air Limbah
Akses terhadap jamban yang tidak layak 9,7% (6977 KK); 3% (2184KK) di perkotaan dan 6.7% (4813 KK) di perdesaan					Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan/Lingkungan	Sistem Pengolahan Air Limbah Berbasis Masyarakat
Belum ada pendanaan untuk Operasional IPLT	Kurang optimalnya pemanfaatan Instalasi		Meningkatkan akses layak menjadi 90% tahun 2022	Peningkatan kinerja institusi pengelola air limbah	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota	Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya
Belum ada truck tinja						
Belum ada masterplan air limbah	Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					
Masyarakat yang memiliki akses terhadap SPALD-T IPALD-T Skala Permukiman berbasis masyarakat sebesar 0,9% (608) KK						
Belum ada tenaga terampil untuk pengelola IPLT						

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
Belum ada regulasi mengenai pengelolaan air limbah dan master plan air limbah	Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem Air Limbah Permukiman	Tersusunnya perencanaan air limbah yang terpadu dan terstruktur	Menyusun dokumen perencanaan Master Plan air limbah dan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik tahun 2018	Peningkatan kapasitas pendanaan dan pengelolaan yang berbasis masyarakat	Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Standar Pedoman Kriteria Bidang Pengembangan PLP Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan Air Limbah Permukiman	Promosi mengenai air limbah melalui media masih kurang		Peran serta KSM, Media dan Tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat dan bersih dengan tidak membuang tinja disembarang tempat di area sangat berisiko 6 desa/kel. dan berisiko tinggi 9	Peningkatan peranserta masyarakat dalam melakukan perilaku hidup sehat dan bersih dengan tidak membuang tinja di sembarang tempat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Dari 36 KSM pengelola infrastruktur air limbah domestik hanya 21 KSM yang berjalan dengan baik, sisanya tidak berjalan					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
			Desa.Kelurahan Prioritas Tahun 2018			
	Kurang memadainya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Air Limbah Permukiman		Pemberian Edukasi secara dini melalui penyediaan fasilitas prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi dasar kepada anak sekolah area sangat berisiko 6 desa/kel.dan berisiko tinggi 9 Desa.Kelurahan Prioritas Tahun 2018		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

5.2. Matriks KKL Pengelolaan Persampahan

Untuk dapat merumuskan Kerangka Kerja Logis (KKL) Sub Sektor Air Limbah berdasarkan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. Alur pikir kebijakan pembangunan sanitasi permukiman sub sektor Air Limbah Domestik, ditunjukkan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5. 2 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Persampahan

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan sampah berupa pengangkutan ke TPA masih 20.39 % untuk perkotaan dan 0.56%	Tingkat pelayanan sampah saat ini hanya mencapai 20.39% untuk perkotaan, dengan kualitas pelayanan yang belum memadai	Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan Pelayanan angkutan sampah ke TPA dari 7.8% menjadi 25% di Perkotaan Tahun 2019	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan	PEMBANGUNAN TPA	Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya
Belum ada dokumen Pengelolaan Terpadu Manajemen Persampahan (PTMP)		Tersusunnya perencanaan dan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif	Penyusunan dokumen rencana teknis dan manajemen persampahan tahun 2018		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
Daya tampung TPA 198 m3/hari, sementara jumlah sampah yang diproduksi 433,87 m3/hr						

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masih rendahnya biaya operasional persampahan	Biaya pengelolaan sampah masih menjadi beban APBD. Rendahnya biaya pengelolaan persampahan pada umumnya karena masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup dan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencemaran lingkungan di TPA					
Sudah banyak TPS yang tidak berfungsi						
Kondisi infrastruktur persampahan khususnya TPS 3R masih sangat membutuhkan penambahan fasilitas		Pengurangan Timbulan Sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya	Peningkatan pengolahan sampah di TPS 3R di Perkotaan Tahun 2019	Mengurangi sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Masyarakat (melayani minimum 200 KK, kap. Pengolahan min. 3 m3/hari dan dikelola KSM)	Pembangunan TPS 3R (termasuk Pembentukan KSM TPS 3R; Persiapan kontribusi masyarakat; Pelatihan manajerial, administrasi dan

**STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan persampahan						keuangan; Penyusunan aturan lokal
Masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat 35.60% dimana di Perkotaan 11.25% di perdesaan 24.35%		Terjalannya komunikasi dan Kampanye sanitasi tentang prohisn melalui media elektronik dan media cetak	Perkuatan komunikasi dan informasi dengan media lokal	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Edukasi terhadap ibu rumah tangga dan anak sekolah tentang pemilahan sampah 3R masih sangat minim						
Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan masih	Sektor persampahan masih belum dapat menarik minat pihak swasta	terjalannya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan	Membangun kemitraan pengelolaan sampah	Fasilitasi Pelaksanaan pengembangan kemitraan	Peraturan dan kelembagaan Persampahan	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

**STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
sangat rendah		persampahan		pengelolaan sampah		

5.3. Matriks KKL Drainase

Untuk dapat merumuskan Kerangka Kerja Logis (KKL) Sub Sektor Air Limbah berdasarkan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. Alur pikir kebijakan pembangunan sanitasi permukiman sub sektor Air Limbah Domestik, ditunjukkan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5. 3 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Drainase Perkotaan

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum ada Dokumen masterplan drainase skala kabupaten, yang ada hanya untuk Kecamatan Maritengngae dan belum pernah di review sejak penyusunannya tahun 2013	Belum adanya Ketegasan Fungsi Sistem Drainase	Mengoptimalkan fungsi drainase untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang bersih dan berkualitas	Meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pemutus air hujan	Mengembangkan sistem drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Perencanaan umum Drainase	Review Masterplan Sistem Drainase
Perencanaan drainase belum memperhatikan elevasi pengaliran / belum tersistem.					Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Luas genangan dari 179.83 Ha	Belum ada penampungan air sementara untuk mengedalikan debit puncak		Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 50% dari kondisi saat ini	Mengoptimalkan sistem yang ada, rehabilitasi/pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan baru		Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Tingginya sedimentasi di saluran drainase akibat kurangnya pemeliharaan						Pemeliharaan saluran drainase/gorong

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) -gorong
Peningkatan kepadatan penduduk dan perkembangan kota mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan yang berpotensi meningkatkan debit banjir						Pembangunan Kolam retensi
Metode pemeliharaan saluran drainase masih menggunakan tenaga manual						
Kurangnya dukungan pendanaan di sektor drainase terutama dari pusat	Penanganan Drainase Belum Terpadu, terutama drainase yang dibangun oleh pihak pengembang yang tidak memperhatikan pembangunan drainase skala primer			Memantapkan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan/Lingkungan	Sistem Pengolahan Drainase Kawasan/Lingkungan

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				keseimbangan tata air		
Adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase			Peran serta KSM, Media dan Tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat dan bersih dengan menjaga drainase dari pembuangan sampah	Menyebarluaskan pemahaman tentang pemeliharaan drainase kepada masyarakat umum	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase			Terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola prasarana dan sarana drainase, swasta/dunia usaha dan peran serta masyarakat	Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri	Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri

STRATEGI SANITASI KOTA 2018-2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Permasalahan Mendesak	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum ada regulasi mengenai pembangunan dan pemeliharaan drainase	Belum adan Peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang menyangkut penanganan drainase perlu disiapkan, seperti pencegahan pengambilan air tanah secara besar-besaran, pembuangan sampah di saluran, pelarangan pengurangan dan penggunaan daerah resapan air (<i>wetland</i>), termasuk sanksi yang diterapkan	Penegakan hukum mengenai penanganan drainase	Menyusun Perda tentang Penanganan Drainase Tahun 2019	Menyusun Perda tentang Penanganan Drainase	Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase	Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN

6.1. RINGKASAN

Ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN).

Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel (minimum) berikut ini.

Tabel 6. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

X 1juta

No.	URAIAN KEGIATAN	Tahun					Total pendanaan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi						-
1.1	Air Limbah Domestik	31,335	30,168	17,637	21,398	23,333	123,869
1.2	Sampah Rumah Tangga	8,080	24,947	14,540	20,474	13,675	81,716
1.3	Drainase Perkotaan	31,911	38,542	35,580	32,738	31,229	170,000
	Jumlah (a)	71,326	93,657	67,756	74,609	68,237	375,585
	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	39,149	39,540	25,568	17,922	13,755	135,934
	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi©	22,236	20,797	15,043	7,054	6,254	71,384
	Gap 1 (a-b)	32,177	54,117	42,188	56,687	54,482	239,651
	Gap 2 (a-c)	49,090	72,860	52,713	67,555	61,983	304,201

Sumber data: lampiran 3 SSK

Tabel 6. 2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber

X Ijuta

No.	Sumber Anggaran	Tahun					Total pendanaan
		2018	2019	2020	2021	2022	
A.	Pemerintah						-
1	APBD Kabupaten/Kota	25,296	26,545	18,616	11,402	7,267	89,126
2	APBD provinsi	2,522	6,970	10,496	6,141	5,758	31,887
3	APBN	27,300	55,598	24,720	48,904	37,820	194,342
4	DAK	11,811	13,952	10,407	6,213	10,206	52,587
	JUMLAH A	66,929	103,065	64,238	72,659	61,051	367,942
B.	Non-Pemerintah	0	0	0	0	0	0
1	CSR Swasta	3,623	847	345	655	4,783	10,253
2	Masyarakat	1,550	190	280	920	5,123	8,063
	JUMLAH B	5,173	1,037	625	1,575	9,906	18,316
	Total (A+B)	72,102	104,102	64,863	74,234	70,957	386,258

Sumber data: lampiran 3 SSK

6.2. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH

Berdasarkan Lampiran 3 SSK pendanaan program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kabupaten/Kota dapat dilihat rekapitulasinya pada Tabel 6.3. total kebutuhan anggaran untuk air limbah domestic adalah Rp. 12.101.000.000,- untuk mencapai universal akses 2019. Dengan memenrikan prioritas pada pembangunan tangki septik individual di seluruh lokasi yang masih belum memiliki akses jamban atau pun akses tidak layak. Selain tangki septick individu juga diarahkan pada pembangunan tangki septick komunal untuk 5-10 KK.

Sementara itu untuk pendanaan di sampah rumah tangga dibutuhkan sebanyak Rp. 16.415.000.000,- dengan prioritas penanganan di kawasan kumuh perkotaan. Pembangunan TPS3R skala rumah tangga menjadi prioritas penanganan, agar sampah dapat dikurangi dari hulu. Redusi yang dihasilkan dapat diangkut ke TPA. Meski demikian ada beberapa lokasi yang dapat dilayani oleh TPA baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya di lokasi perkotaan dan yang jaraknya cukup dekat dengan lokasi TPA. Pelayanan ke TPA secara tidak langsung diantisipasi dengan pembangunan TPS di lokasi-lokasi yang sesuai dengan instrument SSK (lampiran 2). Untuk sektor drainase perkotaan dibutuhkan dana sebesar Rp. 60.610.000.000,- selama 5 tahun. Pemabngunan diaraHkan pada rehabilitasi drainase kawasan permukiman di daerah rawan genangan. Selain itu akan dilakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berupa pembangunan sumur resapan di beberapa titik lokasi yang rawan genangan. Hal ini hanya merupakan percontohan yang diharapkan masyarakat dapat melakukan sendiri pembangunan sumur resapan sehingga lebih ramah lingkungan. Total pendanaan yang direncanakan sebesar Rp. 89.126.000.000,- dengan trend seperti pada Gambar 6.1.

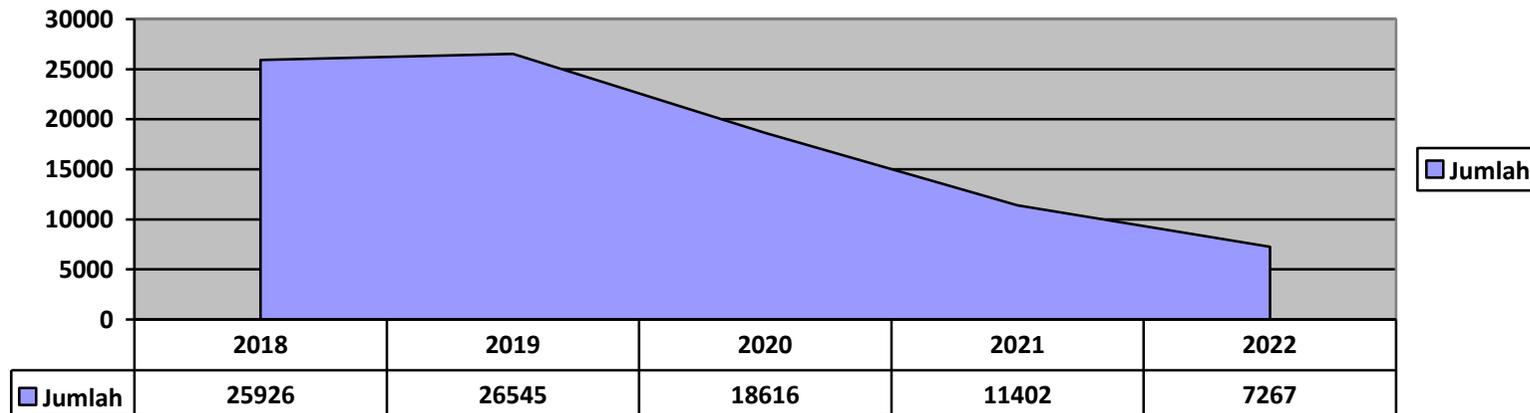
APBD Provinsi, DAK dan APBN untuk lima (5) tahun 2018-2022.

Tabel 6. 3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota

X 1juta

No.	URAIAN KEGIATAN	Tahun					Total Anggaran
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air Limbah Domestik	3,667	4,459	2,055	1,055	865	12,101
2	Sampah Rumah Tangga	2,460	4,030	3,620	4,940	1,365	16,415
3	Drainase Perkotaan	19,169	18,056	12,941	5,407	5,037	60,610
Jumlah		25,296	26,545	18,616	11,402	7,267	89,126

Sumber data: lampiran 3 SSK



Gambar 6. 1 Trend pendanaan Sanitasi sumber pendanaan APBD

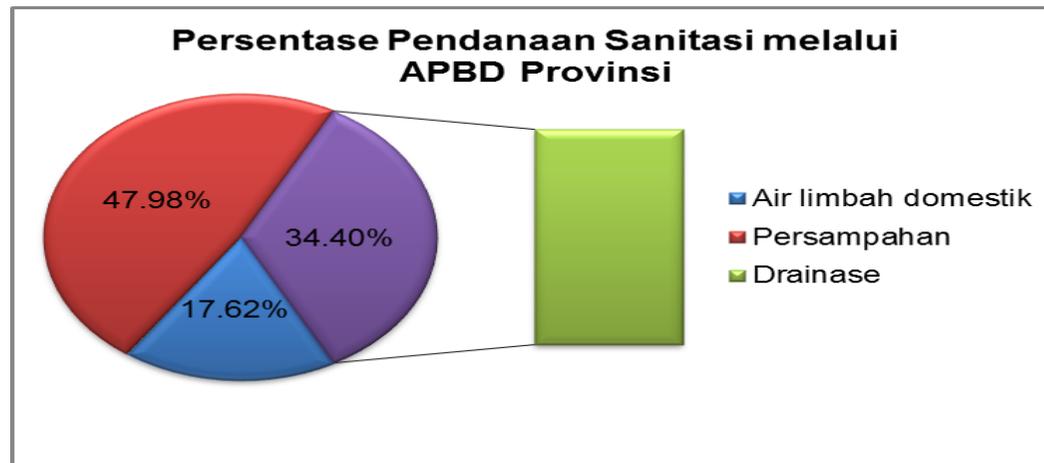
Untuk pendanaan sanitasi berdasarkan APBD provinsi diharapkan adanya komitmen bersama untuk peningkatan cakupan akses layanan sanitasi yang layak. Berdasarkan Tabel 6.4 total pendanaan sanitasi tahun 2018-2022 adalah Rp. 31.887.000.000,- dengan prioritas pada sub sektor persampahan sebesar Rp. 15.300.000.000,-. Hal ini dilakukan mengingat masih minimnya ketersediaan sarana infrastruktur persampahan, dengan memprioritaskan pembangunan TPS3R dan TPS yang dikelola oleh KSM di masing-masing lokasi. Untuk sub sektor drainase diprioritaskan pada rehabilitasi drainase kawasan permukiman yang rawan genangan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 10.968.000.000,- . pada sub sektor air limbah dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.619.000.000,- dengan priortas pada pembangunan pada tangki septick komunal dan pengadaan truck tinja. Porsi penganggaran setiap sub sektor dapat dilihat pada Gambar 6.2

Tabel 6. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

X 1juta

No.	URAIAN KEGIATAN	Tahun					Total Anggaran
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air Limbah Domestik	872	1,891	596	724	1,536	5,619
2	Sampah Rumah Tangga	1,650	3,000	7,100	3,550	-	15,300
3	Drainase Perkotaan	0	2,079	2,800	1,867	4,222	10,968
Jumlah		2,522	6,970	10,496	6,141	5,758	31,887

Sumber data: lampiran 3 SSK



Gambar 6. 2 Persentase Pendanaan Sanitasi melalui APBD Provinsi

Untuk pendanaan sanitasi yang bersumber dari APBN selama 5 tahun dari 2018-2022 sebesar Rp. 194.342.000.000,- dengan investasi tertinggi di sub sektor drainase perkotaan yaitu sebesar Rp. 94.009.000.000,- dan yang terendah adalah di sub sektor persampahan sebesar Rp. 42.631.000.000,- seperti terlihat pada Tabel 6. 5. Pada sub sektor drainase perkotaan pada umumnya memprioritaskan pada rehabilitasi drainase kawasan permukiman di lokasi area genangan. Pengaliran air dari drainase dikawasan permukiman harus dialirkan melalui drainase sekunder dan primer. Namun perencanaan yang ada selama ini masih menggunakan master plan drainase kawasan ibukota kabupaten belum menyeluruh, sehingga perlu dilakukan review master plan drainase untuk skala kabupaten. Dengan adanya perencanaan yang terpadumaka diharapkan pembangunan memiliki arahan yang jelas. Selain itu pada tahun 2022 direncanakan juga membangun kolam retensi di ibukota kabupaten mengingat kondisi geografi kota Pangkajene yang cenderung datar dan kondisi drainase yang belum tersistem sering menjadi masalah pada saat turun hujan, dimana pada debit puncak air akan melimpah sehingga dibutuhkan kolam tunggu.

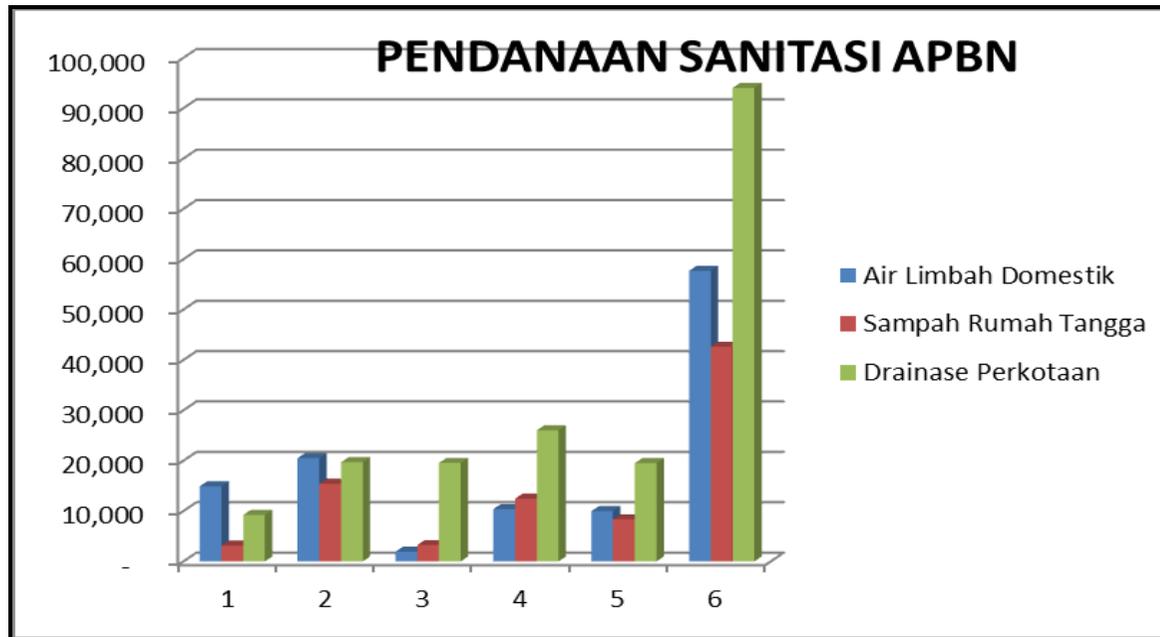
Untuk sub sektor air limbah kebutuhan utamanya adalah outline plan air limbah, sehingga pembangunan infrastruktur air limbah memiliki acuan. Selain itu daya tampung air limbah yang masih 10.2m³ masih menjadi pertimbangan untuk di revitalisasi. Berdasarkan instrument SSK maka kebutuhan IPLT adalah 51,3 m³/hari agar pengelolaan air limbah bisa aman 100%. Untuk sub sektor persampahan lebih menekankan kepada pembangunan TPS3R yang berbasis masyarakat agar sampah dapat diurai mulai dari hulu sehingga beban TPA dapat dikurangi. Meskipun demikian masih tetap dibutuhkan perluasan TPA menjadi 2,95 ha dengan asumsi volume sampah pada tahun 2022 yang terlayani adalah 127 m³/hari. Kebutuhan armada cukup tinggi dari gerobak hingga mobil dump truck. Kebutuhan pembangunan TPS cukup signifikan, mengingat saat ini TPS yang ada cenderung tidak berfungsi.

Tabel 6. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

X 1juta

No.	URAIAN KEGIATAN	Tahun					Total Anggaran
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air Limbah Domestik	14,910	20,502	1,925	10,395	9,970	57,702
2	Sampah Rumah Tangga	3,150	15,407	3,250	12,474	8,350	42,631
3	Drainase Perkotaan	9,240	19,689	19,545	26,035	19,500	94,009
	Jumlah	27,300	55,598	24,720	48,904	37,820	194,342

Sumber data: lampiran 3 SSK



Gambar 6. 3 Pendanaan Sanitasi APBN

Untuk pendanaan sanitasi dari DAK untuk sementara masih dari sektor air limbah, dimana pada tahun 2018 Kab. Sidrap mendapatkan DAK Sanitasi sebesar Rp. 10.011.000.000,- yang antara lain untuk pembangunan tangki septick individu, tangki septick komunal, SPALD-T, truck tinja seperti terlihat pada Tabel 6.6

Tabel 6. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

X 1juta

No.	URAIAN KEGIATAN	Tahun					Total Anggaran
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air Limbah Domestik	10,011	13,332	10,177	5,793	5,578	44,889
2	Sampah Rumah Tangga						
3	Drainase Perkotaan						
	Jumlah	10,011	13,332	10,177	5,793	5,578	44,889

Sumber data: lampiran 3 SSK

6.3. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH

Untuk dapat berhasilnya sebuah pembangunan di suatu daerah harus melibatkan semua stakeholder baik dari unsur Pemerintah, Masyarakat maupun pihak swasta melalui dana CSR. Pada Tabel 6.7 perencanaan pendanaan yang diharapkan dari pihak swasta selama 5 tahun yaitu Rp. 10.253.000.000,-. Untuk sub sektor air limbah diharapkan dapat terlibat pada pembangunan tangki septik individu untuk pencapaian target universal access tahun 2019. Sedang untuk persampahan diharapkan keterlibatan pihak swasta pada pembangunan TPS3R yang berbasis masyarakat dan pengadaan armada pengangkut sampah. Untuk sub sektor drainase lebih ditujukan kepada pihak pengembang perumahan untuk memperbaiki infrastruktur drainase dikawasan perumahan yang mereka bangun.

Tabel 6. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan SWASTA/CSR

No.	URAIAN KEGIATAN	Tahun					Total Anggaran
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air Limbah Domestik	1,823	227	115	235	155	2,555
2	Sampah Rumah Tangga	1,800	620	230	420	545	3,615
3	Drainase Perkotaan	0	0	0	0	4,083	4,083
Jumlah		3,623	847	345	655	4,783	10,253

X 1juta

Sumber data: lampiran 3 SSK

Untuk pendanaan dari pihak masyarakat diharapkan dapat membangun Jamban keluarga mereka sendiri di sektor air limbah, pengolahan sampah yang dikelola melalui TPS3R dan pembangunan sumur resapan di sub sektor drainase.

Tabel 6. 8 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Masyarakat

No.	URAIAN KEGIATAN	Tahun					Total Anggaran
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air Limbah Domestik	1,520	100	220	830	1,068	3,738
2	Sampah Rumah Tangga	0	0	0	0	3,995	3,995
3	Drainase Perkotaan	30	90	60	90	60	330
Jumlah		1,550	190	280	920	5,123	8,063

X 1juta

Sumber data: lampiran 3 SSK

6.4. ANTISIPASI FUNDING GAP

Dari kemampuan pendanaan yang terlihat pada table 6.1 maka terdapat funding gap pendanaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu strategi pendukung yang turut menentukan keberhasilan program pembangunan dibidang sanitasi. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pada kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dalam Perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengetahui sejauhmana batasan kegiatan dan hasil dari pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten yang telah dicapai berdasarkan tahun kegiatan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga merupakan kontrol untuk perencanaan program tahun berikutnya dan membahas penyelesaian kegiatan yang tertunda bahkan sebagai data dasar kegiatan dari perencanaan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan strategi monitoring dan evaluasi sanitasi adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi Kabupaten , untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi Kabupaten , serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Monitoring dan evaluasi ini merupakan pedoman bagi pengambil keputusan dalam pencapaian sasaran pembangunan sanitasi. Kegiatan ini mencakup:

- Menilai ulang kerangka hasil/kerangka SSK.
- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat pokja.
- Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis Nawasis PPSP.

Mekanisme monitoring dan evaluasi kondisi Sanitasi terdiri atas 4 komponen yaitu:

1. Pengumpulan data yang terdiri dari program yang berkaitan dengan sanitasi: kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan.
2. Analisa data dan Pelaporan yang berisi penggambaran kondisi pelaksanaan Sanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu keberhasilannya, dampak dan juga permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi semua stakeholder.
3. Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut tentang perkembangan program dan kegiatan sanitasi.

Implementasi perencanaan dan keputusan yang telah diambil dari rangkaian tahap tersebut di atas Sebagai langkah-langkah kesiapan pelaksanaan kegiatan strategi monitoring evaluasi Kabupaten Sidenreng Rappang tentunya penerapan matriks kerangka logis yang telah ditentukan untuk mengetahui tujuan dan sasaran pelaksanaan sanitasi (Lihat Tabel 7.1. Tabel Capaian Stratejik dan Tabel 7.2. Infrastruktur dan Akses)

Tabel 7. 1 Capaian Strategis Air Limbah

Tujuan	:	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestic					
Sasaran	:	Menurunnya BABS dari 23.20% menjadi 0% di Tahun 2018					
Program	:	Pengembangan Pengelolaan Air Limbah					
Kegiatan	:	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah					
No	Sub Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi	Output	Outcame	Indikasi Investasi	Output	Outcame
1	SPALD- Terpusat Skala Kawasan	600.000.000	Perencanaan Teknis (DED) SAPL T Skala Kawasan	25.000 Jiwa	-	-	-
		150.000.000	Pemicuan	25.000 Jiwa	-	-	-
		650.000.000	Pembebasan Lahan	25.000 Jiwa	-	-	-
		2.200.000.000	Pembangunan SPALT Skala Kawasan	25.000 Jiwa	-	-	-
		500.000.000	Supervisi Pembangunan SPALD-T Skala Kawasan	25.000 Jiwa	-	-	-
		240.000.000	Operasi dan Pemeliharaan SSPALd T Skala Kawasan 1 Paket	25.000 Jiwa	-	-	-
2	SPALD-Setempat (Pembangunan SPALD – S Skala Komunal)	300.000.000	Pemicuan Termasuk Pembentukan Manajerial, administrasi dan keuangan serta penyusunan aturan lokal .1 Paket	1.000 Jiwa	-	-	-
		150.000.000	Pembebasan Lahan 3 Paket	1.000 Jiwa	-	-	-
		1.800.000.000	Pembangunan IPAL Komunal 3 Paket	1.000 Jiwa	-	-	-
		60.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan IPAL Komunal 3 Paket	1.000 Jiwa	-	-	-
3	Sanimas (IPAL Komunal)	200.000.000	Pemicuan Termasuk Pembentukan	1.000 Jiwa	-	-	-

			Manajerial, administrasi dan keuangan serta penyusunan aturan lokal 1 Paket				
		200.000.000	Pembebasan Lahan 4 Paket	1.000 Jiwa	-	-	-
		3.000.000.000	Pembangunan Tangki Septikank Komjnal & Jaringan Perpipaan 4 Paket	1.000 Jiwa	-		-
		200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Tangkiseptik tank Komunal 4 Paket	1.000 Jiwa	-	-	-
4	Pengaturan dan Kelembagaan	250.000.000	Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) 1 Paket	70.000 Jiwa	-	-	-
		570.000.000	Rancangan Ranperda Pengelolaan Air Limbah 1 Paket	70.000 Jiwa	-	-	-

Tabel 7. 2 Capaian Strategis Persampahan

	Tujuan	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan					
	Sasaran :	Perluasan wilayah cakupan pelayanan pengangkutan sampah ke TPA Penerapan Konsep 3R					
	Program :	Pengembangan Pengelolaan Persampahan					
	Kegiatan :	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					
No	Sub Kegiatan	Rencana			Rencana		
		Indikasi Investasi	Output	Outcome	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Perencanaan	500.000.000	Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) 1 Paket	70.000 Jiwa	-	-	-
2	Kendaraan Pengangkut Sampah	6.000.000	Pengadaan Gerobak Sampah 4 Unit	15.000 Jiwa	-	-	-
		250.000.000	Pengadaan Gerobak sampah bermotor 4 Unit	20.000 Jiwa	-	-	-
		1.000.000.000	Pengadaan Mobil Pick Up 4 Unit	20.000 Jiwa	-	-	-
		300.000.000	Supervisi Pembangunan SPALD-T Skala Kawasan	20.000 Jiwa	-	-	-
		100.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Gerobak sampah bermotor 4 Unit	20.000 Jiwa	-	-	-
		150.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Mobil pick up 4 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
3	Pengelolaan Sampah dari TPS sampai Ke TPA	300.000.000	Pengadaan Container 10 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-

		3.000.000.000	Pengadaan Dump Truck 10 Unit	70.000 Jiwa			
		500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Dump Truck 10 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
4	Pembangunan TPS 3R	1.500.000.000	Pembangunan TPS 3R 4 Paket	5.000 Jiwa	-	-	-
		500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R 5 Paket	1.000 Jiwa	-	-	-
5	Alat Angkut Stasiun antara dan TPA	3.000.000.000	Pengadaan Dump Truck 10 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
		500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Dump Truck 10 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
		2.250.000.000	Pengadaan Amroll Truck 10 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
		500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Amrol Truck 10 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
6	Pembangunan TPA	50.000.000	Sosialisasi Rencana Pembangunan TPA 1 Paket	70.000 Jiwa	-	-	-
		100.000.000	Pembebasan Lahan 1Paket	70.000 Jiwa	-	-	-
		15.000.000.000.	Pembangunan TPA 1 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
		300.000.000	Pengadaan Bulldozer 1 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
		1.900.000.00	Pengadaan Axcapator 1 Unit	70.000 Jiwa	-	-	-
		800.000.000	Operasi dan Pemeliharaan dan Fasilitasnya 1 Paket	70.000 Jiwa	-	-	-
	Pengaturan dan Kelembagaan	500.000.000	Rancangan Perda Pengelolaan Persampahan 1 Paket	70.000 Jiwa	-	-	-

Tabel 7. 3 Capaian Strategis Drainase

Tujuan :		Mengurangi resiko genangan					
Sasaran :		Perkotaan : watang pulu, Pancarijang, Watang sidenreng					
Program :		Pembangunan Saluran Drainase					
Kegiatan :		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase					
No	Sub Kegiatan	Rencana			Rencana		
		Indikasi Investasi	Output	Outcame	Indikasi Investasi	Output	Outcame
1	Saluran Drainase Primer	350.000.000	Detail Desaian (DED) Saluran Drinase Primer 1 Paket	70 Ha	-	-	-
		10.500.000.000	Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Primer 3 Paket	70 Ha	-	-	-
		500.000.000	Operasi Dan Pemeliharaan drainase primer 3 Paket	70 Ha	-	-	-
3	Saluran Drainase Sekunder	80.000.000	Detail Desaian (DED) Saluran Drinase Primer 2 Lokasi	36,2 Ha	-	-	-
		59.000.000	Pembebasan Lahan 2 Lokasi	36,2 Ha	-	-	-
		1.515.000.000	Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder 2 Paket	36,2 Ha	-	-	-
		500.000.000	Operasi Dan Pemeliharaan drainase Sekunder 2 Paket	36,2 Ha	-	-	-
4	Saluran Drainase Tersier	160.000.000	Detail Desaian (DED) Saluran Drinase Tersier 3 Paket	55.827 Jiwa	-	-	-
		150.000.000	Pembebasan Lahan 3 Lokasi	1.000 Jiwa	-	-	-
		985.000.000	Supervisi dan Pembangunan Saluran	1.000 Jiwa	-	-	-

			Drainase Primer 3 Paket				
		50.000.000	Operasi Dan Pemeliharaan drainase Tersier 3 Paket	55.827 Jiwa	-	-	-

Tabel 7.4 Infrastruktur dan Akses

No	Infrastruktur	Rencana										Realisasi									
		Output (unit)					Outcome (Jiwa)					Output (Unit)					Outcome (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	SPALD S Skala Komunal	-	-	2 Unit	2 Unit	3 Unit	-	-	400 Jiwa	400 Jiwa	600 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SPAD T Sakala Kawasan	-	-	-	-	1 Unit	19.618 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IPLT	-	-	-	1 Unit	-	-	-	55.827 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4	Truck Tinja		-	-	1 Unit	-	-	-	-	55.827 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gerobak		-	4 Unit	-	-	-	-	55.827 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gerobak Sampah Bermotor	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	55.827 Jiwa	55.827 Jiwa	55.827 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Container	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	55.827 Jiwa	55.827 Jiwa	55.827 Jiwa	55.827 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	TPS 3R	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	200 Jiwa	200 Jiwa	200 Jiwa	200 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dump Truck	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	15.146 Jiwa	15.146 Jiwa	15.146 Jiwa	15.146 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Amroll Trusk	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	15.146 Jiwa	15.146 Jiwa	15.146 Jiwa	15.146 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	TPA	-	-	1 Unit	-		-	-	55,827Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bulldozer	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	55-827 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Excavator	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	55.827 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Drainase	-	-	5 Paket	4 Paket	2 Paket	-	-	-	28 Ha	18 Ha	14 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-

Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sanitasi, guna tercapainya sasaran dari kebijakan sanitasi ditingkat kabupaten Sidenreng Rappang, yakni dengan adanya pelaksanaan kebijakan oleh pelaku serta mengevaluasi hasil-hasilnya. Indikator dampak sebagai perumusan dalam kebijakan dan program. Keterlibatan stakeholders yang ada pada evaluasi hasil dan perumusan program sangat mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Tabel 7. 5 Pelaporan Monev Implementasi SSK

No	Objek Pemantauan	Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan
		Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dari Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantauan		
1	Tabel Capaian Strategis	Bappeda	Dinas PU, Dinas Pera, KP & LH, Dinas Infokom	Dinas PU, Dinas Pera, KP & LH,	Per semester yaitu Bulan Juni dan desember tahun berjalan	Bappeda, Nawasis
2	Tabel Infrastruktur dan Akses	Bappeda	Dinas PU, Dinas Pera, KP & LH, Dinas Infokom, Dinas kesehatan	Dinas PU, Dinas Pera, KP & LH, Dinas kesehatan	Per Triwulan yaitu Bulan Maret, Juni, September dan desember tahun berjalan	Bappeda Nawasis

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017

Tabel 7. 6 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Kegiatan Money Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
Rapat Koordinasi												
Pengawasan Penganggaran												
- Musrenbang												
- Review RPIJM												
- Renja SKPD												
- RKA												
- DPA												
Melengkapi Readiness Criteria												
Input menu Investasi												
Input Menu Akses												
Input Menu Infrastruktur												
Input Menu Progress												
Solusi Funding Gap												
Promosi/Sosialisasi												
Updating SSK Tahunan												

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017